



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PELAKSANAAN FAKTOR TATA KELOLA
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

ANDRY WICAKSONO

0606024573

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JANUARI 2010**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH PELAKSANAAN FAKTOR TATA KELOLA
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 TERHADAP PROFITABILITAS
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Bidang Ilmu Ekonomi
Keuangan Syariah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam
Program Pascasarjana Universitas Indonesia**

ANDRY WICAKSONO

0606024573

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JANUARI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Andry Wicaksono

NPM : 0606024573

Tanda Tangan : 

Tanggal : 8/11/2010

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Andry Wicaksono
NPM : 0606024573
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : **Pengaruh Pelaksanaan Faktor Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia**

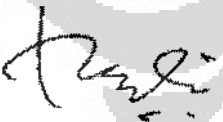
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Drs. A. Hanief Saha Ghafur, MSi.

()

Penguji : Ranti Wiliasih SP. Msi.

()

Pembimbing : Khairul Alwan Ar-Riva'i Nasution, Ph.D.

()

Pembaca Ahli : Nurul Huda SE., MM., Msi.

()

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr Wb

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Keuangan Syariah pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Ibu Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog, Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam;
- (2) Bapak Dr. Drs. A. Hanief Sahagfur Msi, beserta seluruh Dosen Pusat Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
- (3) Bapak Khairul Alwan Ar-Riva'i Nasution, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (4) Teman-teman di bagian administrasi PSTTI Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi dan akademik selama saya menjalani perkuliahan;
- (5) Teman-teman Angkatan XII PSTTI Universitas Indonesia, semoga dapat selalu menjalin kebersamaan dalam kebaikan;
- (6) Kedua Orang Tua dan kedua Orang Tua mertua serta kakak yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa selama ini;
- (7) Istri yang senantiasa memberikan semangat dalam menyelesaikan kuliah; dan
- (8) Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islam.

Wassalamualaikum Wr Wb

Jakarta, Januari 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andry Wicaksono
NPM : 0606024573
Program Kekhususan : Ekonomi Keuangan Syariah
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Departemen : PascaSarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengaruh Pelaksanaan Tata Kelola Terhadap
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Januari 2010

Yang menyatakan



(Andry Wicaksono)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pelaksanaan Faktor Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode analisis deskriptif - korelatif dengan metode regresi data panel.

Penelitian ini bermula dari semakin banyaknya guncangan krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Krisis ekonomi ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan termasuk di sector perbankan. Akan tetapi dampak krisis keuangan tersebut lebih banyak berpengaruh kepada Perbankan Syariah dibanding perbankan konvensional lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya Non Performing Financing (NPF) perbankan syariah sedangkan disisi lain terjadi penurunan Non Performing Loan (NPL) perbankan konvensional pada umumnya.

Disisi lain, Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia pada tahun 2006 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 dan PBI 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 9/12/DPNP. Semua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan Tata Kelola yang baik untuk seluruh bank umum di Indonesia baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. Penerapan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perbankan agar efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan di Indonesia.

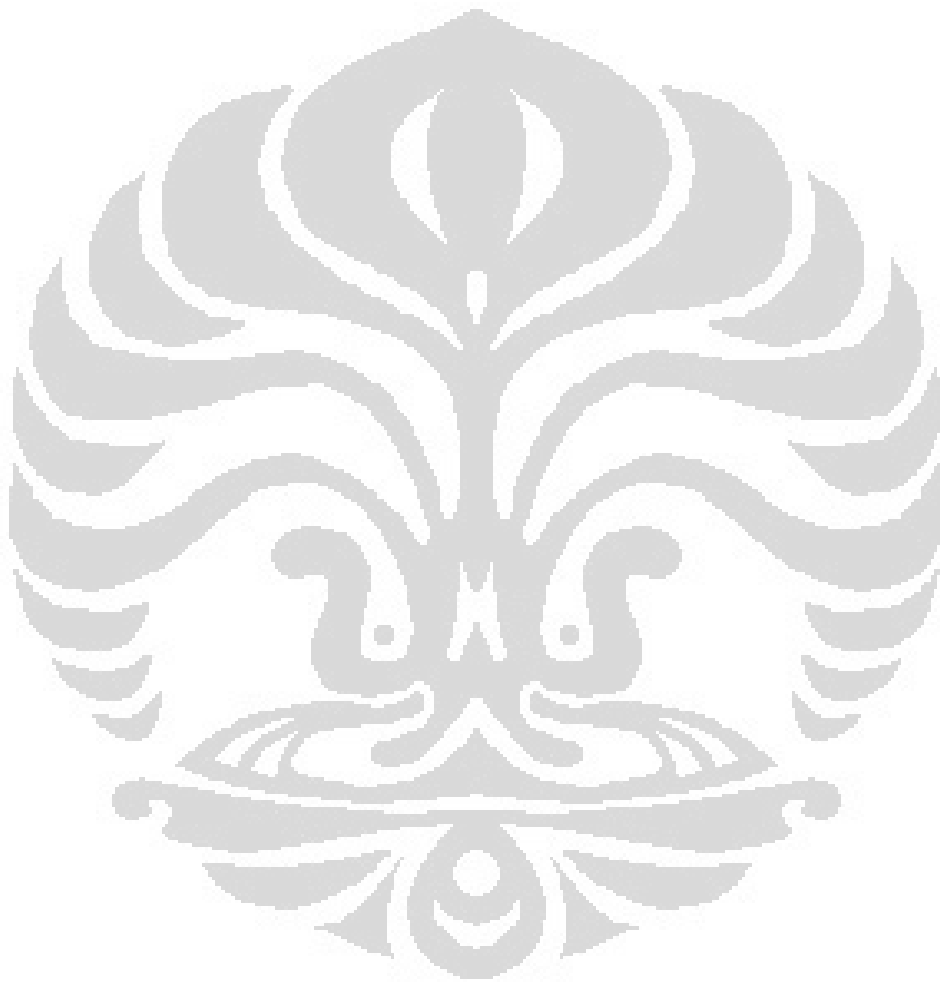
Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa pengaruh pelaksanaan tata kelola belum terlihat secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya perlu diteliti mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan tata kelola terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia yang aktif diantara tahun 2007 dan 2008. Penelitian ini menggunakan variabel independen meliputi 11 faktor tata kelola berdasarkan PBI Nomor 8/4/PBI/2006 dan PBI 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 9/12/DPNP serta menggunakan nilai profitabilitas perbankan berupa rasio *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan program pengolahan data Eviews 4.1. Tahap pengujian penelitian meliputi tahap yaitu, *pertama* melakukan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh, hal ini dilakukan untuk melihat normalitas data. *Kedua*, melakukan pengujian regresi dengan data panel untuk kemudian diperoleh hasil hubungan antara pelaksanaan faktor tata kelola terhadap ROA baik secara simultan maupun parsial. *Ketiga*, melakukan perbandingan pelaksanaan tata kelola antara Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional yang memiliki UUS. Hal ini bertujuan untuk melihat posisi kualitas tata kelola bank syariah terhadap kompetitornya yaitu perbankan konvensional.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini meliputi, *pertama*, Berdasarkan pengujian faktor tata kelola secara simultan dalam regresi panel data, kesebelas faktor tata kelola secara bersama-sama mempengaruhi nilai ROA perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%, sedangkan berdasarkan pengujian secara parsial, bahwa Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*), pelaksanaan kepatuhan signifikan mempengaruhi nilai ROA secara positif, Pelaksanaan

tugas komite, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan hubungan dengan pihak terkait, dan faktor strategi bank signifikan mempengaruhi nilai ROA secara negatif, serta Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit ekstern, dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak secara signifikan mempengaruhi nilai ROA. *Kedua*, Pada tahun 2007 maupun 2008, pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS. Akan tetapi peningkatan kualitas tata kelola di bank umum syariah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan ROA. *Ketiga*, Secara umum, kualitas pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah dalam kondisi yang baik. Terjadi peningkatan kualitas tata kelola yang cukup tinggi untuk rata-rata kesebelas faktor tata kelola pada tahun 2008 dibanding tahun 2007.



ABSTRAK

Nama : Andry Wicaksono
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul : **Pengaruh Pelaksanaan Faktor Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia**

Tesis ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan tata kelola sebagaimana telah diwajibkan oleh Bank Indonesia terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan *Pooled Least Squares Model*. Variabel independennya adalah 11 faktor tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006, sedangkan variabel dependennya adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Tesis ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Tahunan untuk tahun 2007 dan 2008 dari 3 (tiga) bank umum syariah dan 22 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan pelaksanaan kepatuhan signifikan mempengaruhi nilai ROA secara positif, untuk faktor Pelaksanaan tugas komite, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan hubungan dengan pihak terkait, dan faktor strategi bank signifikan mempengaruhi nilai ROA secara negatif. Sedangkan faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit ekstern, dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak signifikan mempengaruhi nilai ROA. Hasil perbandingan kualitas tata kelola menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS akan tetapi rata-rata ROA bank umum syariah pada tahun 2007 dan 2008 lebih rendah dari ROA bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Kata kunci:

Corporate governance, dewan komisaris, direksi, komite, *conflict of interest*, kepatuhan, audit intern dan ekstern, *risk management*, *related party*, *transparency*, *strategy* dan ROA

ABSTRACT

Name : Andry Wicaksono
Study Program : Middle East and Islam
Judul : **Effect of Corporate Governance Implementation based on Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 on Profitability Ratio of Sharia banking in Indonesia.**

This research aims to investigate the effect of corporate governance Implementation on performance of Sharia banking in Indonesia as have been obliged by Bank of Indonesia. This research used panel data analysis with *Pooled Least Squares Model*. Independent variable consist of eleven factor of corporate governance based on Bank Indonesia Regulation and than dependent variabel is Return on Asset (ROA). This research used secondary data from annually report of 3 (three) sharia commercial bank and 22 commercial bank with sharia unit (UUS) for year 2007 and 2008.

The results show that factor of board of commissioners, conflict of interest, and also compliance activities have positif relationship with ROA. Factor of committee, risk management, related party policy and corporate strategy have negative relationship and significant with ROA. Meanwhile board of directors, internal and external audit, and transparency have no significant with ROA. Comparision of corporate governance implementation between sharia commercial banks and commercial bank with UUS, result show that average implementation of corporate governance in sharia commercial bank is higher than corporate governance in commercial bank with UUS, however average ROA of sharia commercial bank is lower than average ROA in commercial bank with UUS.

Keywords:

Corporate governance, board of commissioners, board of directors, committee, conflict of interest, compliance, internal and external audit, risk management, related parties, transparency, strategy and also ROA.

صنخل مېل

مېسا = يېردن يېنار لکوالا wicaksono
جم اړېلېا مېسارد = مال سېرال او طس وړال قېر شل
ن او نخل = وج ؤ حېالېا ايس يېنودن لک نېب لېا ادا نېس مالک مېل ذېف نېت رې شات ل ماع
8/14/PBI/2006 ؤ يې حېر ل ادع 8/4/PBI/2006
ايس يېنودن ا يېف ؤ يې فر ص مېل ؤ عېر شل دض

لک نېل لېبوق نېم بېر ل ط مېل وړ ح ن ل ا و ل ع م ل ک م ل ذ ي ف ن ت ر ي ش ات م ر ق ا ن ي ؤ م و ر ط ا ل ا ه ذ ه
ؤ ح و ل م س ا ر د ل ا م ذ ه . ايس يېنودن ا يېف ؤ يې مال سېرال ا فر اص مېل ا ؤ يې حېر يېف ايس يېنودن ا ل
و ه ل ق ن ت س م ل ا ر ي غ م ت م ل ا . يې چ ن و م ن ل ا ت ا ع م ر م ل ا ع م ؤ ع م م ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا ل ي ل ح ت م د خ ت س ي
ايس يېنودن لک نېل ل ي م س ا ل ا م ا ظ ن ل ا يېف ه ي ل ع ص ر و ص ن م و ه ا م ل 11 ن م م ل ک م ل ل م ا ع ل ا
ي ل ع د ي ا ع ل ا ق ب س ن و ه ر ي غ م ت م ل ا ن ا ن ي ح يېف ، م د خ ل ا 8/4/PBI/2006 و ج 8/14/PBI/2006
ر ي د ق ت ل ا ي ا ؤ ي و ن ا ش ل ا ت ا ن ا ي ب ل ا م د خ ت س ي ؤ م و ر ط ا ل ا م ذ ه . (يې م ي ل ق ا ل ا ب ت ک م ل ا) ل و ص ا ل ا
ف ر اص م ل ا و ؤ ي م ا ل س ر ا ل ا ف ر اص م ل ا (م ت ا ل ا ت) 3 ن م ق ر ت م ل ا يېف 2008 و 2007 ي م ا ع ل ا ي و ن س ل ا
ؤ ي م ا ل س ر ا ل ا ل م ا ع ا ل ا ت ا د ح و 22 ع م ؤ ي د ي ل ق ت ل ا

م ا م ل ا ل م ا و ع ل ا ن ا ب ج ا ن ت س ا ل ا ن م ا ه ي ل ع ل و ص م ل ا ح ت ي ت ل ا چ ي ا ت ن ل ا ل ي ل ح ت ن م
ب ر ا ض ت) م ل ا ص م ل ا ب ر ا ض ت ؤ چ ل ا ع م و ، م ر ل م ل ا ا م ب ع ل ط ض ي ي ت ل ا ت ا ي ل و و س م ل ا و
ت ا د و چ و م ل ا ي ل ع د ي ا ع ل ا م ي ق ي ل ع ا ر ي ب ل ا ا ر ي ش ات ر ش و ت ل ا ش ت م ا ل ا ذ ي ف ن ت و (م ل ا ص م ل ا
ب ا ح ص ا ع م م ت ا ق ا ل ع ل ا ق ر ا د ا و ، ر ط ا خ م ل ا ق ر ا د ا و ، م ن م ل ا م ا م ل م ا ع ي ل ا ، ي ب ا ج ي ا و ه
ي ل ع د ي ا ع ل ا م ي ق ي ل ع ا ر ي ب ل ا ا ر ي ش ات ر ش و ت ل م ا و ع ل ک ن ب ل ا ؤ ي ج ي ت ا ر ت س ا و ، ؤ ح ل ص م ل ا
ذ ي ف ن ت و ، ن ي ر ي م ل ا ت ا ي ل و و س م و م ا م ل م ا و ع ل ا ن ا ن ي ح يېف . ؤ ي ب ل س ل ا ت ا د و چ و م ل ا
ر ش و ت ا ل ح ا ف ن ل ا ي د ا ب م ذ ي ف ن ت و ، ذ ي ف ن ت ل ا ؤ ي ج ر ا خ ل ا ؤ ع ج ا ر م ل ا و ؤ ي ل خ ا ن ل ا ؤ ع ج ا ر م ل ا
ن ي ب ي ؤ ي ب س ر ل ا ؤ د و چ ل ا ج ي ا ت ن . ت ا د و چ و م ل ا ي ل ع د ي ا ع ل ا م ي ق ي ل ع ا ر ي ب ل ا ا ر ي ش ات
ع م م ر ا ق م ل ل ض ر ف ا ؤ ي ع و ن م ي ق ا م ي ل ؤ ي م ا ل س ر ا ل ا ل ک و ن ب ل ا يېف م ل ک م ل ا ذ ي ف ن ت ن ا ب م ل ک م ل ا
ت ا د و چ و م ل ا ي ل ع د ي ا ع ل ا ط س و س م م ل ي ت ل ا ؤ ي د ي ل ق ت ل ا ل ک و ن ب ل ا يېف م ل ک م ل ا ذ ي ف ن ت
ؤ ي ف ر ص م ل ا ت ا د و چ و م ل ا ي ل ع د ي ا ع ل ا ن م ل ق ا ي ه 2008 و 2007 ي م ا ع يېف ؤ ع ي ر ش ل ا ل ک و ن ب ل ل
ل م ا ع ا ل ا ق د ح و ؤ ع ي ر ش ل ا و ا م و م ع ؤ ي د ي ل ق ت ل ا

ت ا ح ل ط ص م ل ا
، م ل ا ص م ل ا ب ر ا ض ت و ، ن ا ج ل ل ا و ن ي ر ي م ل ا و ن ي ض ر و ف م ل ا س ل ج م ، ت ا ل ک ر ش ل ا م ل ک و ح
، ق ل ص ل ا ت ا ذ ف ا ر ط ا ل ا ع م ، ر ط ا خ م ل ا ق ر ا د ا و ، ؤ ي ج ر ا خ ل ا و ؤ ي ل خ ا ن ل ا ؤ ع ج ا ر م ل ا و ، ل ا ش ت م ل ا و
ا ي ق ي ر ف ا ل ي م ي ل ق ا ل ا ب ت ک م ل ا ؤ ي ج ي ت ا ر ت س ا و ، ؤ ي ف ا ف ش ل ا و

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Pembatasan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	9
1.6. Hipotesis Penelitian.....	12
1.7. Metode Penelitian.....	13
1.8. Sistematika Pembahasan.....	14
Bab II KERANGKA TEORI.....	16
2.1. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	16
2.2. Konsep Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	18
2.2.1. Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia.....	22
2.2.2. Tata Kelola di Perbankan Syariah.....	24
2.3. Konsep Kinerja Keuangan Perbankan.....	35
2.4. Penelitian Sebelumnya.....	38
Bab III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2. Objek Penelitian.....	44
3.2.1. Gambaran Populasi dan Sampel.....	44
3.2.1.1. Gambar Populasi.....	44
3.2.1.2. Gambaran Sampel dan Data Penelitian.....	44
3.2.2. Sumber Data.....	45
3.2.3. Periode Penelitian.....	46
3.2.4. Variabel Penelitian.....	46
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3.1. Penetapan Rancangan Hipotesis.....	52

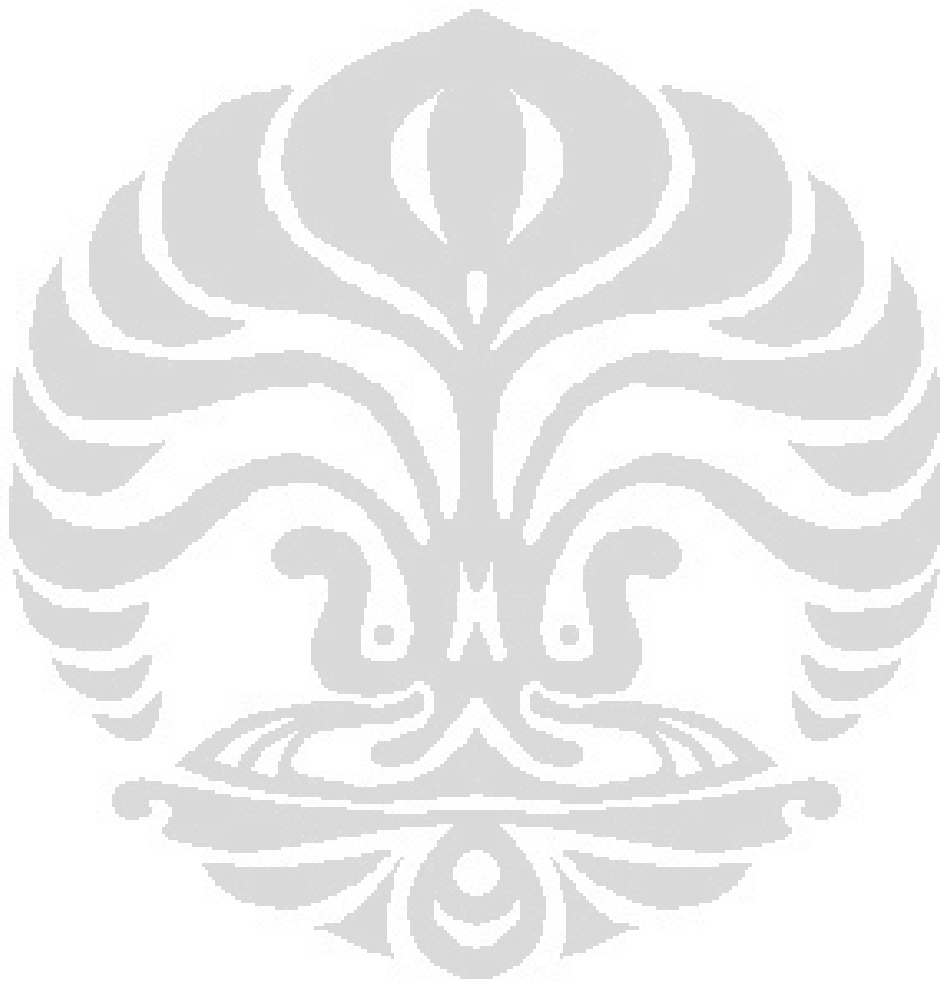
3.3.2. Penetapan Hipotesis.....	54
3.3.3. Tes Statistik dan Pengujian Tes Statistik.....	55
3.3.4. Metode Analisis.....	57
3.4 Pengujian <i>Pooled Least Squares Model</i> dan <i>Fixed Effect Model</i>	57
3.4.1 Pengujian Asumsi Regresi Linier.....	58
3.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	59
3.4.3 Uji Parsial / T-Statistik.....	59
3.4.4 Uji Simultan / F-Statistik.....	60
3.4.5 Penarikan Kesimpulan.....	61
Bab IV ANALISA PELAKSANAAN FAKTOR TATA KELOLA.....	62
4.1 Deskripsi Data.....	62
4.2 Hasil Pengolahan Data.....	65
4.2.1 Penaksiran Koefisien Determinasi (R^2).....	68
4.2.2 Pengujian Parsial (t-stat) Regresi Data Panel.....	68
4.2.3 Pengujian Keseluruhan /Simultan (F-stat).....	71
4.3 Analisa Variabel Independen secara Parsial.....	71
4.4 Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum Syariah Dengan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.....	77
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR REFERENSI.....	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan kinerja perbankan umum dengan perbankan syariah	4
Tabel 2.1	Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 8/14/PBI/2006.....	22
Tabel 2.2	Sub Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006	23
Tabel 2.3	Nilai-Nilai Syariah sebagai Dasar Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah.....	27
Tabel 2.4	Pihak yang Berkepentingan dalam <i>Corporate Governance</i> Bank Syariah.....	31
Tabel 3.1	Faktor-faktor Pelaksanaan Tata Kelola PBI No. 8/4/PBI/2006 Jo 8/14/PBI/2006.....	47
Tabel 3.2	Sub Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006	48
Tabel 3.3	Kriteria Peringkat Faktor-faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006.....	50
Tabel 4.1	Output Hasil Pengolahan Data Panel <i>Pooled Least Squares</i>	65
Tabel 4.2	Output Hasil Pengolahan Data Panel <i>Fixed Effect Method</i>	66
Tabel 4.3	Kesimpulan Model yang digunakan dalam Penelitian.....	67
Tabel 4.4	Hasil Pengolahan Data dengan Menggunakan Eviews.....	71
Tabel 4.5	Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah.....	78
Tabel 4.6	Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola.....	79
Tabel 4.7	Perbandingan Pelaksanaan Dewan Komisaris.....	79
Tabel 4.8	Perbandingan Pelaksanaan Direksi.....	80
Tabel 4.9	Perbandingan Tata Kelola Komite.....	81
Tabel 4.10	Perbandingan Tata Kelola Benturan Kepentingan.....	81
Tabel 4.11	Perbandingan Tata Kelola Kepatuhan.....	82
Tabel 4.12	Perbandingan Tata Kelola Audit Intern.....	82
Tabel 4.13	Perbandingan Tata Kelola Audit Ekstern.....	83
Tabel 4.14	Perbandingan Tata Kelola Manajemen Risiko.....	83
Tabel 4.15	Perbandingan Tata Kelola Pihak Terkait.....	84
Tabel 4.16	Perbandingan Tata Kelola Prinsip Keterbukaan.....	84
Tabel 4.17	Perbandingan Tata Kelola Strategi.....	85

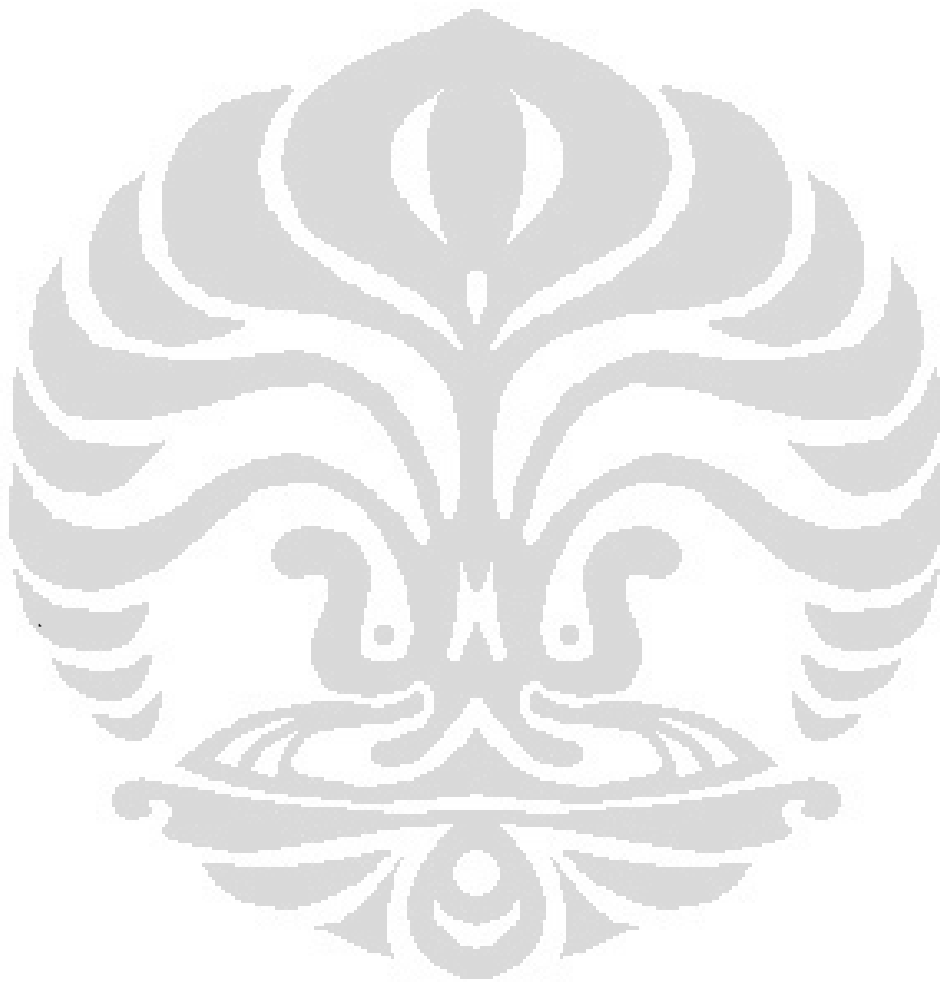
DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Rekap Perkembangan Penilaian Faktor Tata Kelola Perkembangan Syariah.....	62
Grafik 4.2	Rekap Perkembangan Median Faktor Tata Kelola Perbankan Syariah.....	63
Grafik 4.3	Rekap Nilai Maksimal, Minimal dan Standar Deviasi.....	64



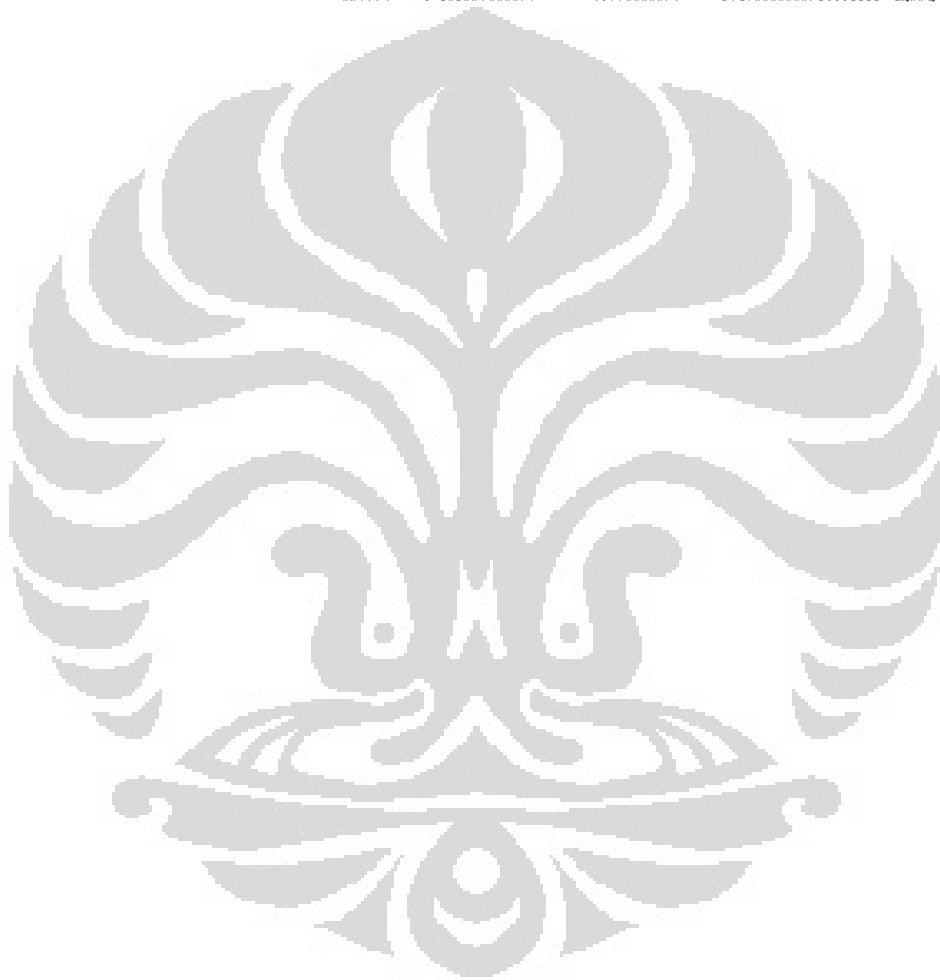
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Potensi Konflik Kepentingan antara Investor Account Holder (IAH), Pemegang Saham dan Pengelola Pada Bank Syariah Serta penyebabnya.....	35
Gambar 2.2 <i>Key player in corporate governance of financial institutions...</i>	41
Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Output Regresi Dengan <i>Pooled Least Square Method</i>	L.1
2. Lampiran 2 Output Regresi dengan <i>Fixed Effect Method</i>	L.2
3. Lampiran 3 Output Regresi dengan <i>Random Effect Method</i>	L.3
4. Lampiran 4 Rekap Pelaksanaan GCG Perbankan Islam Tahun 2007 dan Tahun 2008	L.4
5. Lampiran 5 Rekap Pelaksanaan GCG Perbankan Islam Tahun 2007 dan Tahun 2008 Setelah Disesuaikan Dengan Pengolahan Data Eviews 4.1.....	L.5
6. Lampiran 6 Kertas Kerja <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i>	L.6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia pada sepuluh tahun terakhir ini mengalami depresi yang amat dalam karena berbagai krisis keuangan yang terjadi diberbagai belahan dunia. Kita masih ingat krisis yang terjadi di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 yang mengakibatkan beberapa bank umum konvensional seperti Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Bali, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Harapan Sentosa serta beberapa lembaga keuangan lain mengalami kebangkrutan.

Pada tahun 2000-an, dunia juga dikejutkan oleh tumbangnya perusahaan raksasa dunia seperti Enron Corporation, Consesco, GlobalCrossing, WorldCom dan Tyco di Amerika Serikat, Maxwell Communication Corporation dan Mirror Group Newspaper di Inggris, Parmalat di Italia, Perusahaan Asuransi raksasa HHH Insurance Ltd dan perusahaan telkom terbesar ketiga One-Tell Ltd di Australia, Swissair di Switzerland, Baring Futures di Singapura, dan Peregrine Investment Ltd di Hongkong. (Siswanto Sutojo, 2005).

Pada tahun 2008, ekonomi dunia kembali diguncang krisis yang sangat dalam. Krisis kali ini dimulai dari krisis *Sub Prime Mortgage* yang terjadi di Amerika dan kemudian merambat keseluruh sistem ekonomi dunia. Krisis ini telah menumbangkan banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brother yang merupakan bank investasi terbesar keempat di Amerika dan telah berusia 158 tahun, Perusahaan perumahan terbesar, Fannie Mae dan Freddie Mac serta Perusahaan keuangan Merrill Lynch juga bangkrut dan dijual kepada Bank of Amerika. Bahkan Perusahaan raksasa AIG juga hampir pasti bangkrut jika tidak disuntik tambahan modal oleh pemerintah Amerika Serikat.

Keterpurukan ekonomi Amerika akibat krisis tersebut sangat besar mempengaruhi penurunan ekonomi di hampir semua negara dunia termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah ekspor Indonesia ke Amerika

Serikat dan negara-negara besar lainnya karena adanya penurunan daya beli di negara-negara tersebut. Penurunan jumlah ekspor tersebut praktis membuat beberapa industri mengalami kesulitan likuiditas karena tidak seimbangnya antara pendapatan yang semakin kecil dengan pengeluaran yang semakin besar akibat naiknya harga barang modal. Selain karena penurunan jumlah ekspor, dampak krisis keuangan global juga diakibatkan karena banyak investor menarik kembali investasinya yang telah dilakukan di Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas di negara asalnya. Kondisi ini mengakibatkan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang cukup signifikan.

Kejadian yang menimpa lembaga keuangan dunia ini telah mengakibatkan rusaknya sistem keuangan seluruh negara. Akan tetapi dari sudut pandang keislaman, kejadian tersebut merupakan bukti betapa rapuhnya sistem keuangan dunia saat ini yang menjalankan usaha berbasis bunga. Hal ini bertentangan dengan konsep Islam yang telah jauh hari mengharamkan sistem keuangan berbasis bunga dan lebih mendorong terhadap sistem keuangan yang berbasis kepada jual beli atau perdagangan. Allah SWT pun telah berfirman:

... وَ أَسْحَلَّ اللَّهُ تُبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS Al-Baqarah 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ٢٩)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Selain bunga, rusaknya sistem keuangan dunia juga diakibatkan banyaknya perusahaan konvensional yang menjalankan usaha dengan mengandalkan utang dari pihak lain dibandingkan dengan modal sendiri, diperbolehkannya kegiatan

perdagangan terhadap produk *derivatif* yang berisiko tinggi seperti *short selling*, *margin trading*, SWAP serta produk *derivatif* lain yang tidak memiliki *underlying asset* yang jelas. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda dalam hadits antara lain:

لَا يَبِيعُ مَا كَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

"Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

لَا يَحِلُّ مَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانَةٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا يَبِيعُ مَا كَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه لترمذي وابن عزيمة والحاكم).

"Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu"

(HR. Al Khomsah dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي عن ابن عمر)

"Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar" (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّجَشُّسِ (متفق عليه)

"Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu" (Muttafaq 'alaih)

"Seorang muslim adalah saudara muslim (yang lainnya), tidak halal bagi seorang muslim jika menjual kepada saudaranya suatu barang yang ada cacat kepadanya kecuali ia menjelaskannya." (HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan Al-Hakim)

Hadist Rasulullah SAW tersebut pada dasarnya merupakan prinsip bagi seluruh manusia dalam menjalankan kegiatan bermuamalah sehingga menciptakan rasa keadilan bagi sesama. Vogel dan Hayes (1998) juga menyatakan bahwa dunia [keuangan] Islam terlihat lebih mengandalkan dana ekuitas dibandingkan hutang untuk membiayai kegiatan bisnis. Kondisi tersebut membuat lembaga keuangan syariah tumbuh secara wajar karena pertumbuhan yang terjadi disebabkan adanya peningkatan fundamen perusahaan dan bukan didominasi faktor luar (hutang). Peningkatan kinerja perusahaan yang bersumber dari dalam itulah yang membuat lembaga keuangan Islam lebih tahan terhadap pengaruh faktor makro ekonomi.

Ekonomi Indonesia secara umum memang mengalami penurunan dalam 2 (dua) tahun terakhir akibat dampak dari krisis yang terjadi di Amerika. Akan tetapi penurunan ini lebih disebabkan faktor luar yaitu penarikan investasi asing dalam jumlah cukup besar di Indonesia. Hal tersebut juga berdampak kepada perbankan Indonesia (termasuk perbankan syariah) yang mengalami penurunan kinerja walaupun oleh Bank Indonesia masih dikategorikan cukup aman.

Berdasarkan data dari tahun 2005 sampai dengan juni 2009, diperoleh informasi perkembangan kinerja bank syariah dan bank umum yang beroperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan kinerja perbankan umum dengan perbankan syariah

Rp. Miliar

Indikator	Des 2005		Des 2006		Des 2007		Des 2008		Juni 2009	
	BU	BS	BU	BS	BU	BS	BU	BS	BU	BS
CAR	19.3		21.27		19.3		19.79		19.06	
NPL	7.56	2.82	8.07	4.75	4.07	4.05	3.2	3.95	3.04	4.39
ROPO	89.5	78.81	96.98	76.77	84.05	78.54	88.59	81.75	87.71	73.56
ROA	2.56	1.35	2.84	1.55	2.78	2.07	2.33	2.44	2.87	2.16
LDR/FDR	50.68	97.75	64.58	86.9	60.32	60.76	74.58	103.85	73.2	100.22

Indikator	Des 2008		Des 2008		Des 2007		Des 2008		Juni 2009	
	BU	BS	BU	BS	BU	BS	BU	BS	BU	BS
ASET	1,201,030	20,880	1,538,821	26,722	1,792,481	33,018	3,067,644	48,565	2,356,751	55,238
Share Aset Bank Syariah thd Bank Umum		1.74%		1.74%		1.84%		2.40%		2.34%
LABA tahun berjalan	24,687	238	28,334	356	35,015	481	30,606	432	23,314	517
Pertumbuhan Laba			19.80%	48.54%	23.58%	35.49%	-12.56%	-10.19%	-23.83%	19.88%
Modal Diserap	89348	851	73048	991	78824	1017	96253	1752	88738	1801

Keterangan

BU: Bank Umum (Konvensional & Syariah)

BS: Bank Syariah

Sumber: Data statistik Bank Indonesia Juni 2009 "telah diolah kembali"

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kinerja perbankan syariah secara umum lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank umum yang beroperasi di Indonesia. Akan tetapi salah satu aspek Bank Syariah yang kurang baik dibandingkan dengan Bank Umum yaitu terlihat dari nilai *Non Performing Financing* (NPF/NPL) bank syariah yang masih diatas bank lain pada umumnya, penulis berpendapat bahwa hal ini wajar terjadi mengingat *Financial to Deposit Ratio* (FDR/LDR) bank syariah yang jauh diatas bank lain pada umumnya, tingginya FDR selain meningkatkan risiko kredit yang berdampak kepada peningkatan nilai NPF, disisi lain juga sangat membantu meningkatkan laba bank syariah sehingga lebih baik dari bank umum lainnya.

Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor eksternal meliputi tingkat suku bunga, inflasi, GDP, jumlah penduduk dan sebagainya, sedangkan faktor internal salah satunya merupakan kemampuan manajemen untuk menjalankan tugas sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Tata Kelola (*corporate governance*) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep tata kelola ini, yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip tata kelola, secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et.al, 1996 dalam researchengines.com).

Penerapan konsep tata kelola dalam pandangan Islam memiliki tujuan yang lebih besar dari pada hanya peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Tujuan tata kelola syariah tersebut antara lain :

- a. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu'ah ayat 10);
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183);

- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

1.2 Perumusan Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini telah berdampak kepada perekonomian Indonesia termasuk kedalam sektor perbankan. Akan tetapi dampak krisis ekonomi tersebut lebih berdampak kepada perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai NPF perbankan syariah secara signifikan sejak tahun 2005. Hal yang berbeda terjadi di bank umum konvensional lainnya dimana sejak tahun 2005 secara keseluruhan mengalami penurunan NPL.

Disisi lain, Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia pada tahun 2006 telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 dan PBI 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 9/12/DPNP. Semua peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan Tata Kelola yang baik untuk seluruh bank umum di Indonesia baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah. Penerapan peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan perbankan agar efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa pengaruh pelaksanaan tata kelola belum terlihat secara signifikan terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Oleh karenanya perlu diteliti mengenai pengaruh kualitas pelaksanaan tata kelola terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Selain itu, apabila dilihat dari dua strategi besar pengembangan perbankan syariah yaitu melalui pendirian Bank Umum Syariah dan pendirian unit usaha syariah, perlu juga diteliti mengenai perbandingan pelaksanaan tata kelola antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, secara rinci dapat ditarik 2 (dua) pertanyaan penelitian yaitu:

- 1). Bagaimana pengaruh faktor pelaksanaan tata kelola berdasarkan PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 terhadap peningkatan kinerja keuangan Perbankan Syariah pada tahun 2007 dan 2008.
- 2). Bagaimana perbandingan pelaksanaan tata kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikaitkan dengan kinerja keuangan Perbankan Syariah pada tahun 2007 dan 2008.

1.3 Pembatasan Masalah & Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan pembatasan masalah yang akan diangkat yaitu :

1. Data yang akan digunakan

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia yang aktif diantara tahun 2007 dan 2008. Data tersebut yaitu :

a. Bank Umum Syariah

Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 5 (lima) Bank Umum Syariah yang aktif diantara tahun 2007 dan 2008 yaitu PT Bank Muamalat Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega, PT Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin. Akan tetapi, untuk Bank Syariah BRI dan Bank Syariah Bukopin tidak dimasukkan dalam data penelitian ini mengingat kedua bank ini baru didirikan pada tahun 2008.

b. Unit Usaha Syariah

Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat 28 Bank Konvensional aktif yang memiliki Unit Usaha Syariah pada tahun 2008, akan tetapi sampel yang dijadikan objek penelitian terdiri atas 22 Bank Konvensional aktif yang memiliki Unit Usaha Syariah, hal ini

mengingat objek yang diteliti harus aktif pada tahun 2007 dan 2008. Objek yang dijadikan penelitian yaitu : PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Jabar, HSBC Ltd, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Permata, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Ekspor Indonesia, PT Bank Danamon, PT Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, PT Bank DKI, PT Bank Internasional Indonesia, BPD Sumatera Selatan, BPD Kalimantan Timur, BPD DIY, BPD Sulawesi Selatan, BPD Riau, BPD KalSel, BPD Sumatera Barat, BPD Sumatera Utara, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Kalimantan barat.

2. Data yang dijadikan acuan bersumber dari data sekunder yang antara lain meliputi: Data Sekunder berupa data laporan pelaksanaan tata kelola serta laporan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2007 dan 2008.
3. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh implementasi penerapan prinsip tata kelola sebagaimana tercermin dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum terhadap kinerja keuangan bank.
4. Penelitian ini tidak membahas mengenai prinsip tata kelola yang dikeluarkan organisasi internasional lainnya.
5. Rasio keuangan yang dijadikan dasar dalam mengukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini yaitu rasio profitabilitas melalui *Return on Assets* (ROA).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat pengaruh pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah pada tahun 2007 dan 2008 serta bagaimana perbandingan pelaksanaan tata kelola Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah.

Secara khusus tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

- 1) Melihat pengaruh faktor pelaksanaan tata kelola berdasarkan PBI 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 terhadap peningkatan kinerja keuangan Perbankan Syariah pada tahun 2007 dan 2008.
- 2) Melakukan perbandingan pelaksanaan tata kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikaitkan dengan kinerja keuangan Perbankan Syariah pada tahun 2007 dan 2008.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bermula dari banyaknya penelitian yang mengungkapkan adanya hubungan antara salah satu komponen tata kelola terhadap kinerja perusahaan sebagaimana diungkapkan Mak dan Li (2000), Luoma dan Goodstein (1999) dan McKinsey (2002). Disamping itu pula tidak sedikit juga penelitian yang mengungkapkan sebaliknya, yaitu pelaksanaan tata kelola tidak memiliki keterkaitan dengan kinerja perusahaan seperti diungkapkan Hermalin dan Weisbach (1991) yang menemukan tidak adanya hubungan antara komposisi dewan direktur dengan nilai perusahaan dimana kesimpulan tersebut juga didukung penelitian Dalton, Daily, Ellstrand dan Johnson (1998) sedangkan penelitian Rhoades, Recners dan Sundaramurthy (2000) hanya menemukan sedikit korelasi positif hubungan komposisi direktur dengan nilai perusahaan.

Disisi lain Bank Indonesia telah meningkatkan standar perbankan nasional mengikuti standar *international best practice* terutama dalam hal penerapan tata kelola. Dua referensi utama yang secara luas diadopsi sebagai panduan pengembangan tata kelola lembaga perbankan yaitu "*the OECD Princiles*" yang dibuat oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dan "*BCBS Guidelines*" yang dikeluarkan oleh BCBS-BIS (*Basel Committee on Banking Supervision – Bank for International Settlement*) yang keduanya tetap berpedoman kepada prinsip umum GCG yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), Akuntabilitas (*accountability*), kewajaran (*fairness*), independensi (*independency*). Dari penjabaran prinsip GCG tersebut, OECD membagi pengaturan implementasi GCG kedalam 5 (lima) bagian yaitu

Universitas Indonesia

Right of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure & Transparency, Responsibility of the Boards, sedangkan prinsip yang dikembangkan BCBS pada prinsipnya dikembangkan dalam upaya mengadopsi prinsip pokok OECD yang khusus diberlakukan pada lembaga bank dengan penambahan berbagai aspek khusus yang perlu diperhatikan bank dan otoritas perbankan.

Standard tata kelola bagi industri perbankan syariah dirancang oleh organisasi IFSB (*Islamic Financial Services Board*) yang pada prinsipnya juga berpedoman pada sumber referensi mengenai tata kelola yang salah satunya telah dikeluarkan oleh OECD dan BCBS-BIS. IFSB berpendangan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam GCG standar konvensional relevan dan hampir tidak ada pertentangan dengan prinsip dan nilai syariah, walaupun diakui bahwa pendekatan konvensional bersifat sekuler yang lepas dari unsur ketauhidan dan akuntabilitas kepada Allah SWT. Oleh karena itu IFSB lebih fokus kepada area yang belum dicakup oleh kedua standard GCG tersebut (OECD & BCBS). Draft standard IFSB terkait tata kelola perbankan syariah terdiri dari 7 panduan pokok yang terbagi kedalam 4 area yaitu pendekatan umum *governance* bank syariah, perlindungan hak *investment account holders* (IAH), pemenuhan prinsip syariah dan transparansi dalam pelaporan khususnya berkaitan dengan rekening investasi.

Bank Indonesia selaku regulator perbankan di Indonesia dalam menyusun peraturan mengenai tata kelola juga senantiasa berbasis kepada *Internasional best practice* yang berlaku sebagaimana diatur oleh OECD, BCBS dan IFSB. Kerangka tata kelola yang diterapkan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah sebagaimana dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;

- c. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Berdasarkan teori tersebut diatas penelitian ini disusun dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan korelatif dengan metode regresi berganda dengan tujuan untuk mencari dan membuktikan faktor-faktor apa saja dari atribut masing-masing prinsip tata kelola yang signifikan mempengaruhi kinerja perbankan syariah pada tahun 2007 dan 2008.

Adapun variabel yang akan digunakan adalah :

1) Independen

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite;
- d. Penanganan benturan kepentingan;
- e. Penerapan fungsi kepatuhan dan kepatuhan syariah;
- f. Penerapan fungsi Audit Interen;
- g. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- h. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- i. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal;
- k. Rencana strategis Bank;

2) Dependen

Yang menjadi variabel dependen dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan perbankan yaitu Rasio *Return on Assets (ROA)*.

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teori dengan menggunakan metode deduktif, maka penulis mengajukan hipotesis bahwa semua faktor pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah sesudah ditetapkan peraturan Bank Indoensia tentang kewajiban pelaksanaan tata kelola bagi bank umum di Indonesia

Adapun parameter yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah :

A. Secara bersama-sama atau simultan

Ho1 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari kesebelas faktor tata kelola terhadap ROA

Ha1 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari kesebelas faktor tata kelola terhadap ROA

B. Secara Parsial

1 Ho2 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Dewan Komisaris terhadap ROA

Ha2 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Dewan Komisaris terhadap ROA

2 Ho3 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Direksi terhadap ROA

Ha3 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Direksi terhadap ROA

3 Ho4 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor komite terhadap ROA

Ha4 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor komite terhadap ROA

4 Ho5 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor benturan kepentingan terhadap ROA

Ha5 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor benturan kepentingan terhadap ROA

5 Ho6 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor audit intern terhadap ROA

Ha6 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-

- sama (simultan) dari faktor audit intern terhadap ROA
- 6 Ho7 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor ekstern terhadap ROA
- Ha7 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor ekstern terhadap ROA
- 7 Ho8 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor manajemen risiko terhadap ROA
- Ha8 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor manajemen risiko terhadap ROA
- 8 Ho9 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor pihak terkait terhadap ROA
- Ha9 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor pihak terkait terhadap ROA
- 9 Ho10 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor transparansi terhadap ROA
- Ha10 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor transparansi terhadap ROA
- 10 Ho11 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor strategi terhadap ROA
- Ha11 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor strategi terhadap ROA
- 11 Ho12 : ρ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor kepatuhan terhadap ROA
- Ha12 : ρ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor kepatuhan terhadap ROA

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan melakukan pengujian kepada setiap variabel independen terhadap variabel dependen sehingga diperoleh pengaruhnya. Data yang dipakai dalam penelitian bersumber dari data-data sekunder yang berasal dari laporan tahunan perbankan syariah pada periode tahun 2007 dan 2008 serta penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif - korelatif dengan metode regresi data panel. Penelitian deskriptif

adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan se jelas mungkin tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti, dan penelitian korelatif adalah penelitian yang ingin melihat hubungan antar variable. Penelitian korelatif tersebut dilakukan dengan analisa regresi data panel yaitu untuk menjawab rumusan permasalahan melalui model ekonometri yang merupakan model dengan data panel yaitu data gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bantuan program Eviws 4.1 untuk mengolah pengaruh pelaksanaan tata kelola terhadap kinerja keuangan dan program excel untuk menghitung kinerja keuangan dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2008. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 Dekom + \beta_2 Direksi + \beta_3 Komite + \beta_4 Conflict + \beta_5 Patuh + \beta_6 Intern + \beta_7 Ekstern + \beta_8 Risk + \beta_9 Related + \beta_{10} Trans + \beta_{11} Strategy + \epsilon \dots\dots\dots(1.1)$$

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan serta pembahasan dalam tesis ini berjalan secara terarah dan sistematis, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, hipotesa, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Kerangka Teori

Merupakan bab yang memuat tentang kerangka teori tentang konsep tata kelola dan tata kelola syariah, konsep kinerja keuangan serta Peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban pelaksanaan tata kelola di bank umum sebagaimana tercantum dalam PBI nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah sebagian dalam PBI nomor 8/14/PBI/2006, serta penelitian sebelumnya mengenai hubungan pelaksanaan tata kelola terhadap kinerja perusahaan.

3. Bab 3 Metodologi Penelitian

Merupakan bab yang menguraikan mengenai metodologi yang dipakai untuk pemecahan masalah, dan data yang digunakan serta *flowchart* dan penjelasan tahap/prosedur penyelesaian masalah.

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bab yang menguraikan tentang pengujian hipotesa, analisa dan pembahasan mengenai faktor apa saja dari setiap prinsip tata kelola yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah tahun 2007 dan 2008, yaitu sesudah adanya peraturan bank indonesia tentang kewajiban pelaksanaan tata kelola serta menampilkan perbedaan pelaksanaan tata kelola bank umum syariah dengan unit usaha syariah. Bab ini juga menjelaskan hasil penelitian serta pengaruhnya terhadap tujuan penelitian.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab yang memuat kesimpulan atas hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan pengaruh tata kelola terhadap kinerja perbankan syariah.

BAB II

KERANGKA TEORI

Didalam Bab I telah dijelaskan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang menjadi bahan penelitian didalam penulisan tesis ini.

Dalam Bab II ini, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa teori tentang konsep dasar ekonomi Islam, teori mengenai tata kelola (*good corporate governance*) berdasarkan *Internasional Best Practice* baik berbasis konvensional dan berbasis Syariah, konsep tata kelola berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban pelaksanaan tata kelola serta teori tentang kinerja perusahaan (perbankan). Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai hasil penelitian terdahulu tentang hubungan pelaksanaan tata kelola terhadap kinerja perusahaan.

2.1 Konsep Dasar Ekonomi Islam

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah) maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

- a. Aqidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
- b. Syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

- c. Akhlaq, landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "*Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah*"

Berdasarkan ketiga pilar keIslaman tersebut, agama Islam juga memberikan banyak tuntunan turunan yang mengatur secara spesifik hubungan antar manusia dalam kehidupan ekonomi umat. Tuntunan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi sehingga uang tidak layak untuk diperdagangkan terlebih perdagangan tersebut mengandung unsur ketidakpastian atas nilai uang atau spekulasi (*gharar*). Dalam Islam juga tidak mengenal perubahan harga uang dikaitkan dengan berlalunya waktu (*time value of money*).
- b. Riba dalam segala bentuknya dilarang, hal ini sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan *Islamic bankers* dikalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukum riba adalah haram.
- c. Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat.
- d. Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.
- e. Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan wajib dilakukan sehingga tidak seorangpun tanpa bekerja (yang berarti siap menghadapi resiko) dapat

- memperoleh keuntungan atau manfaat (bandingkan dengan perolehan bunga bank dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).
- f. Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun.
 - g. Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan profesi akuntansi dan notaris).
 - h. Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

2.2 Konsep Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata Kelola (*Corporate governance*) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, penggunaan kata "Tata Kelola" masih dirasa belum sepenuhnya dapat menggambarkan secara jelas tentang maksud kata *corporate governance*, sehingga masih banyak ketentuan dan literatur yang menggunakan istilah aslinya. Bank Indonesia juga dalam Peraturannya yang mengatur mengenai tata kelola masih menggunakan istilah aslinya. Sutojo dan Aldridge (2005) mengungkapkan bahwa kata "governance" berasal dari bahasa perancis "*guberanncce*" yang berarti pengendalian, kemudian kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain menjadi istilah *corporate governance*.

Krisis ekonomi 1997 yang terjadi di Asia menyebabkan negara-negara di Asia menjadi laboratorium penelitian oleh banyak ahli. Penelitian Mckinsey & Company dalam Sunarsip (2001), penelitian CLSA dalam Setianto (2002) dan IICG dalam Djalil (2001) secara garis besar menyatakan bahwa salah satu penyebab krisis yang terjadi di Asia pada tahun 1997-an adalah karena buruknya penerapan *Corporate governance*.

Selanjutnya banyak peneliti yang berusaha mencari faktor-faktor yang mempengaruhi struktur *corporate governance* suatu perusahaan. Penelitian Klapper dan Love (2002) serta Jang dan Kim (2003) sama-sama menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* dipengaruhi oleh lingkungan luar maupun keadaan di dalam perusahaan. Lingkungan luar yang dimaksud adalah *legality*, aturan mengenai *shareholders rights*, dan *judicial efficiency*. Sedangkan keadaan didalam perusahaan yang mempengaruhi *corporate governance* adalah *growth opportunities* dan peranan *intangible assets*. Adam dan Mehran (2003) mengungkapkan bahwa struktur *corporate governance* adalah spesifik industri yang disebabkan karena adanya perbedaan *investment opportunities*. Hal yang berbeda diungkapkan Gillian, Hartzell dan Starks (2003) yang mengungkapkan bahwa pemilihan struktur *corporate governance* dipengaruhi oleh *cost* dan *benefits* yang dihadapi perusahaan, selain itu bahwa *industry's investment opportunities*, *product uniqueness*, *competitive environment*, *information environment*, dan *leverage* mampu menerangkan struktur *corporate governance*.

Sangat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa *corporate governance* berdampak kepada nilai perusahaan, penelitian Choong-En Bai, et al (2003) menunjukkan bahwa variabel-variabel *corporate governance* berhubungan signifikan dengan penilaian perusahaan. Jang dan Kim (2003) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara peringkat *corporate governance* dengan rasio keuangan dan penilaian kinerja harga saham perusahaan-perusahaan besar. Beliau juga mengemukakan bahwa indeks *corporate governance* memiliki hubungan positif dengan kenaikan nilai buku (*book value*) perusahaan, kenaikan 10% *corporate governance index* akan diikuti oleh kenaikan *Tobin's q* sebesar 6% dan kenaikan *market/book ratio* sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan Drobetz, Schillhofer, Zimmerman (2003) terhadap perusahaan-perusahaan di Jerman juga menunjukkan hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut memperkuat hasil penelitian Klapper dan Love (2002) yang menyatakan bahwa *corporate governance* memiliki korelasi positif dengan *operating performance* dan *market valuation*.

Binhadī (2005) berpendapat bahwa penerapan tata kelola dapat membawa perusahaan menjadi lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan atau perbaikan pola kerja termasuk pengambilan keputusan yang baik sehingga pada gilirannya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Disamping itu pelaksanaan tata kelola juga bermanfaat untuk menciptakan landasan untuk berkembang dalam jangka panjang, meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah maupun pasar pada umumnya, dan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*) dan kepuasan para *stakeholders*. Berdasarkan survey, investor bersedia membayar 20% - 30% lebih tinggi dari harga saham bagi perusahaan yang melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Disamping itu, pelaksanaan tata kelola juga dapat mempermudah diperolehnya pembiayaan dengan harga yang lebih rendah dan syarat-syarat yang lebih baik.

Shabsigh (2001) mengungkapkan bahwa secara umum *corporate governance* terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Tujuan tersebut umumnya antara lain memaksimalkan *return* dari modal yang diinvestasikan melalui monitoring yang efektif dan penggunaan sumber daya yang efisien, dan dalam banyak hal dipengaruhi pula oleh tujuan-tujuan sosial tertentu. Oleh karena sifat kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan dalam berbagai bentuk kegiatan terutama pembiayaan dan investasi itulah maka sangatlah diperlukan suatu upaya perlindungan yang memadai agar fungsi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. (Cadbury, 2001)

Risiko yang dihadapi oleh bank haruslah dipantau dengan suatu mekanisme *check and balance* yang memadai agar dapat menjaga kepercayaan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan fungsi perbankan. Hal-hal yang terkait dengan mekanisme *check and balance* inilah yang menjadi fokus perhatian dari sistem tata kelola perusahaan.

Tata kelola pada institusi bank memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tata kelola pada perusahaan non-bank. Hal ini terutama disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok *stakeholders* yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga.

Namun, keberadaan kelompok deposan pada perbankan konvensional tidaklah terlalu banyak mempengaruhi struktur tata kelola bank. Alasannya adalah: pertama, secara akad bank telah menetapkan jaminan untuk membayar penuh simpanan nasabah; kedua, penerapan skema penjaminan baik oleh lembaga penjamin simpanan maupun pemerintah; dan ketiga penerapan secara ketat sejumlah rambu-rambu dalam bentuk ketentuan kehati-hatian perbankan oleh otoritas pengawasan perbankan. Faktor-faktor inilah yang melindungi kepentingan nasabah deposan terhadap kepentingan *stakeholder* lainnya dalam bank, sehingga mengurangi desakan perlunya struktur *governance* yang khusus untuk melindungi kepentingan para deposan bank.

Penerapan tata kelola dalam suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan gabungan berbagai macam fungsi yang menyatu dan saling bergantung satu dengan lainnya sebagai suatu sistem. Sistem tersebut berorientasi pada lima pilar tata kelola perusahaan yang baik yaitu :

1. Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan bank efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), kepatuhan terhadap perundang-undangan dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Independensi (*Independency*), pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* bank.

Pelaksanaan kelima prinsip Tata kelola perusahaan yang baik tersebut memiliki tujuan untuk :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* bukan pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.1 Tata Kelola Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Pengaturan mengenai pelaksanaan tata kelola perbankan di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia no. 8/4/PBI/2006 dan PBI no. 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 9/12/DPNP yang secara keseluruhannya mengatur tentang kewajiban pelaksanaan Tata Kelola yang baik untuk seluruh bank umum di Indonesia baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Peaturan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan diatas merinci penerapan kelima prinsip tata kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Keadilan) menjadi 11 (sebelas) komponen besar sebagai berikut :

Tabel 2.1 Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006

No	Faktor – Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00

Tabel 2.1 Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 (lanjutan)

No	Faktor – Faktor	Bobot (%)
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	5.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15.00
11	Rencana strategis Bank	5.00
	Total	100.00

Sumber : Bank Indonesia

Penilaian faktor tata kelola tersebut, menurut peraturan tersebut muncul dari penilaian dari beberapa sub faktor. Hal ini agar penilaian tata kelola menjadi terukur sehingga dapat terlihat progress peningkatan atau penurunan pelaksanaan tata kelolanya. Sub faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sub Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006

Sub Faktor	Nilai
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	
a. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
c. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
d. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
e. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	
a. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	

Universitas Indonesia

Tabel 2.2. Sub Faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 (lanjutan)

Sub Faktor	Nilai
b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
c. Efektivitas Rapat Direksi	
d. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
e. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)	
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
a. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
b. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
c. Efektivitas Rapat Komite	
4. Penanganan benturan kepentingan	
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank	
6. Penerapan fungsi audit intern	
7. Penerapan fungsi audit ekstern	
8. Fungsi manajemen risiko termasuk system pengendalian intern	
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	
a. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
b. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	
c. Kecukupan Pelaporan Internal	
11. Rencana strategis Bank	

Sumber : Bank Indonesia

2.2.2 Tata Kelola di Perbankan Syariah

Secara prinsip, semua perusahaan baik berbasis syariah ataupun tidak memerlukan pelaksanaan tata kelola untuk memperkokoh kepercayaan publik dan kreditur, mempermudah mendapatkan pembiayaan dan menurunkan biaya modal, meningkatkan kinerja usaha yang berkelanjutan, meningkatkan nilai saham dan reputasi perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, menjaga organ perusahaan memenuhi kewajiban fidusia dan

menghindar dari doktrin *piercing the corporate veil*, menciptakan dukungan *stakeholders* serta menurunkan *assimetric information* dan biaya *agency*.

Maulana (2008) mengungkapkan bahwa perlu adanya *corporate governance* berbasis syariah karena keunikan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah. Secara prinsip, terdapat perbedaan konsep antara tata kelola perbankan konvensional dan tata kelola perbankan syariah. Pada bank konvensional, sistem tata kelola dikembangkan dengan membentuk unsur tata kelola yang lengkap baik itu struktur, proses dan hasil. Struktur tata kelola memperjelas fungsi, kewenangan dan pola hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, komite dan manajemen bank. Sedangkan pada perbankan syariah, selain hal – hal yang telah tercakup dalam sistem konvensional, struktur tata kelola akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah terutama kewajiban pemenuhan prinsip syariah dan perbedaan posisi nasabah yang lebih tepat disebut *investment account holders*. Konsep tata kelola ini sesuai dengan nilai-nilai Islam antara lain *Iman, Ahlaq*, kepemimpinan *ilahiyah, amanah* dan *loyal, jama'ah*, komunikatif, efisiensi dan optimalisasi sumber daya, niat ikhlas dan *Ishlah*.

Konsep dasar yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah harus bersumber dalam Al-Quran dan Al-Hadist dengan kaidah pokok berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali terdapat larangan yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist
- 2). Hanya Allahlah yang berhak mengharamkan dan menghalalkan suatu hal, manusia hanya memiliki hak berjihad yaitu menafsirkan atas apa yang dijelaskan Al-Quran dan Al-Hadist.
- 3). Sesuatu yang bersifat najis, dan merusak harkat manusia dan lingkungan adalah haram
- 4). Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram
- 5). Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal

- 6). Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka
- 7). Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan yaitu :
 - a. Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kebaikan
 - b. Kepentingan sosial dan luas diutamakan daripada kepentingan individu yang sempit
 - c. Manfaat kecil dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar
 - d. Bahaya kecil dapat dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar

Keharusan tampilnya bankir syaria'ah sebagai pionir penegakan tata kelola dibanding konvensional, menurut Algaoud dan Lewis (1999) karena permasalahan *governance* dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. *Pertama*, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang penting dalam *governance structure* perbankan syariah. *Kedua*, karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *good corporate governance* menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah (Archer dan Karim, 1997). *Ketiga*, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang *inherent* dalam praktik bisnis perbankan syariah (Sigit Pramono, 2002).

Good Corporate Governance pada pengelolaan bank dalam tata nilai Islam bertolak dari paradigma, azas, dan karakteristik entitas bisnis syariah yang acuannya berupa sumber hukum utama agama Islam yaitu Al-Quran yang dijabarkan melalui tiga norma utama yaitu Aqidah, Akhlak dan Syariah. Bank

Indonesia melalui kajiannya menjabarkan norma keislaman kedalam pilar dan struktur *corporate governance* sebagai berikut:

Tabel 2.3 Nilai-Nilai Syariah sebagai Dasar Penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah

ASPEK GCG	KETERANGAN	NILAI PRINSIP SYARIAH YG RELEVAN
Struktur dan Komposisi Pengurus Bank	Bank memiliki komposisi dan jumlah komisaris dan direksi yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas, kemampuan keuangan dan sasaran strategis bank. Selain kemampuan dibidang manajemen financial komisaris dan direksi memiliki kemampuan untuk memberikan suri tauladan secara moralitas	<ul style="list-style-type: none"> • Adil – Menempatkan personil sesuai dengan kompetensinya • Mas'uliyah – Akuntabilitas dalam melakukan pekerjaan; optimalisasi sumber daya • Intaj – Produktivitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas • Ihsan dan Fathanah – Profesionalisme yang bersumber dari kompetensi dan akuntabilitas sehingga dapat berfikir strategis • Kepemimpinan Ilahiyah – memberikan suri tauladan
Penanganan <i>conflict of interest</i>	Sistem manajemen interen yang disusun dapat meminimalkan terjadinya <i>conflict of interest</i> Manajemen selaku pihak eksekutor memiliki integritas untuk menentukan keputusan yang benar walaupun secara ketentuan tidak menyalahi	<ul style="list-style-type: none"> • Ijabiyah – <i>Positive attitude</i> dalam menyikapi potensi terjadinya "Agency Problem" akibat adanya <i>conflict of interest</i> • Istiqamah – konsistensi terhadap aturan dalam menjalankan pekerjaan • Mas'uliyah – akuntabilitas dalam melakukan pekerjaan
Independensi Pengurus	Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemampuan untuk bertindak independen dan menangani pengaruh pihak eksternal yang dapat mengakibatkan kualitas GCG memburuk	<ul style="list-style-type: none"> • Independen – independen dalam setiap pengambilan keputusan dan tidak terganggu oleh pengaruh-pengaruh informal
Kemampuan dalam mempertahankan kualitas GCG	Kemampuan untuk mencegah atau membatasi kegiatan usaha bank yang menurunkan kualitas GCG seperti pemberian kredit yang tidak sehat dengan menggunakan kepentingan pihak pengurus Hubungan yang sehat antara atasan dan bawahan yang ditandai dengan hubungan yang harmonis dan efektifnya rantai koordinasi antar individu dalam perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Iman – memiliki orientasi yang jelas disemua level • Ahlaq – para pengurus memiliki intense yang positif dalam menjalankan tugas • Kepemimpinan Ilahiyah – Implementasi konsep pengayoman terhadap subordinasinya • Amanah dan Loyal – dalam memegang komitmen • Jama'ah – keteraturan dan ketaatan kepada pimpinan dalam mencapai tujuan

Tabel 2.3 Nilai-Nilai Syariah sebagai Dasar Penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah (lanjutan)

ASPEK GCG	KETERANGAN	NILAI PRINSIP SYARIAH YG RELEVAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Komunikatif – kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara informatif • Efisiensi dan optimalisasi sumber daya termasuk waktu – <i>cost consciousness</i> dalam mencapai tujuan • Niat dan Ikhlas – memiliki niat yang baik dalam menjalankan tugas • Ishlah – dorongan untuk melakukan perbaikan secara terus menerus
Transparansi Informasi dan Edukasi	Bank memiliki transparansi yang cukup dalam menyelenggarakan GCG dan menginformasikan kepada <i>public</i> sehingga pihak <i>stakeholders</i> termasuk nasabah akan teredukasi yang pada akhirnya akan memitigasi potensi terjadinya <i>rush</i> akibat informasi yang menyesatkan	<ul style="list-style-type: none"> • Learning Organization – organisasi yang membuka peluang yang besar terhadap peningkatan pengetahuan para pengurusnya secara khusus dan <i>stakeholders</i> secara umum • Sidq – konsep kejujuran yang dibangun melalui ‘<i>inner beauty</i>’ dan system yang transparan
Efektivitas kinerja fungsi komite	Adanya pemahaman yang cukup dari Komisaris dan Direksi dalam memahami risiko dan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi bank	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi dan Optimalisasi sumber daya – mendorong kinerja organisasi yang efisien dipandang dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Distribusi value added yang seimbang	Memiliki system pembagian <i>value added</i> yang adil dan pelayanan baik terhadap organisasi (secara intern) maupun seluruh <i>stakeholders</i> (masyarakat sekitar dan lingkungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Adil – mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan kepada nasabah, <i>shareholders</i>, manajemen dan lingkungan termasuk alam • Tawazun – keseimbangan dalam mencapai tujuan dunia dan akhirat.
Persaudaraan	Memiliki mekanisme yang mendukung tercapainya musyawarah secara internal dan hubungan sekitarnya dalam membangun ukhuwah	<ul style="list-style-type: none"> • Ukhuwah – memiliki hubungan yang dekat dan positif di dalam manajemen dan antara pihak bank dan eksternal • Musyawarah – pengambilan keputusan yang selalu kepada <i>maslahat</i> • Sifaturrahmi – membangun hubungan yang baik dengan <i>stakeholders</i>

Tabel 2.3 Nilai-Nilai Syariah sebagai Dasar Penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah (lanjutan)

ASPEK GCG	KETERANGAN	NILAI PRINSIP SYARIAH YG RELEVAN
Peran pembelajaran kepada masyarakat	Memiliki suatu mekanisme yang memungkinkan bank melakukan positioning yang sesuai baik secara financial maupun dalam hal membangun tatanan secara keseluruhan	• Tabligh – kegiatan yang dilakukan mempertimbangkan fungsi pendidikan dan pembelajaran kepada seluruh <i>stakeholders</i>
Service Excellence	Memiliki motif pelayanan yang tinggi terutama terhadap nasabah	• Ri'ayah – Semangat untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan <i>stakeholders</i>

Sumber : Bank Indonesia

Standard tata kelola bagi industri perbankan syariah dirancang oleh organisasi IFSB (*Islamic Financial Services Board*) yang pada prinsipnya berpedoman pada sumber referensi mengenai tata kelola khususnya *best practices* dan *guidelines* yang salah satunya telah dikeluarkan oleh OECD dan BCBS-BIS. IFSB berpendangan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam tata kelola standar konvensional relevan dan hampir tidak ada pertentangan dengan prinsip dan nilai syariah, walaupun diakui bahwa pendekatan konvensional bersifat sekuler yang lepas dari unsur ketauhidan dan akuntabilitas kepada Allah SWT. Oleh karena itu IFSB lebih fokus kepada area yang belum dicakup oleh kedua standar *Good Corporate Governance* tersebut (OECD & BCBS). Draft standard IFSB terkait *Corporate Governance* perbankan syariah terdiri dari 7 panduan pokok yang terbagi kedalam 4 area yaitu

A. Pendekatan umum *governance* bank syariah.

1. Prinsip pertama, "*Lembaga keuangan syariah (LKS) harus memiliki kerangka kebijakan governance yang komprehensif, yang mengatur fungsi dan peran strategis dari organ governance serta mekanisme kerjanya dalam rangka menjamin keseimbangan tanggung jawab organ tersebut terhadap berbagai stakeholders*".

Rekomendasi :

- Merekomendasikan dibentuknya Komite Governance (KG) yang terdiri minimal 3 anggota dengan komposisi yang disesuaikan, misalnya anggota dari komite audit, 1 anggota dari ahli syariah (DPS), dan 1 anggota dari direktur

- KG berwenang untuk memonitor pelaksanaan kerangka kebijakan GCG, menyediakan informasi dan rekomendasi kepada dewan komisaris dan Direksi atas dasar temuan hasil pengawasannya.
2. Prinsip kedua, *"LKS harus memastikan bahwa pelaporan keuangan dan non-keuangannya memenuhi standar akuntansi internasional yang berlaku yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh otoritas pengawasan di negara masing-masing"*.

Rekomendasi :

- LKS perlu membentuk Komite Audit (KA) yang beranggota minimal terdiri dari 3 anggota (1 ketua dan 2 anggota) yang berasal dari luar direksi yang memiliki kemampuan analisa keuangan.
- KA bertanggung jawab dalam menilai dan mengawasi seluruh proses audit dan akuntansi LKS dan IFRS menyarankan agar LKS merujuk kepada berbagai panduan yang ada (BCBS-BIS, OECD, IFR).

B. Perlindungan hak nasabah (*investment account holders (IAH)*).

3. Prinsip ketiga, *LKS harus mengakui hak-hak IAH untuk mengetahui kinerja investasinya dan menetapkan prosedur dan mekanisme yang memadai untuk terlaksananya hak-hak tersebut.*

Rekomendasi:

- LKS harus memiliki mekanisme pemberian informasi mengenai hak-hak berkaitan dengan akad sebelum nasabah menandatangani akad, selain itu nasabah diberikan hak untuk memperoleh informasi tentang tatacara perhitungan bagi hasil dan kebijakan pengelolaan aktiva produktif / investasi bank.
- LKS memiliki panduan intern yang mengatur tentang:
 - 1) Kemampuan (*Fit and proper*) pegawai yang bertanggungjawab dalam manajemen investasi
 - 2) Perlindungan investasi IAH
 - 3) Pengungkapan informasi dan material yang relevan bagi IAH
 - 4) Penetapan alokasi bagi hasil yang tepat dan kebijakan investasi yang mempertimbangkan pula *risk-expectation* IAH

4. Prinsip keempat, "LKS perlu mempunyai dan menerapkan suatu strategi investasi yang berhati-hati yang juga mempertimbangkan ekspektasi risk-return nasabah pemilik dana (dengan memperhatikan perbedaan karakteristik *restricted* dan *unrestricted IAH*), dan transparan dalam penerapan penyetaraan bagi hasil"

Rekomendasi :

- Dalam mengembangkan strategi investasi LKS perlu mempertimbangkan ekspektasi risk return nasabah (IAH) dengan cara:
 - 1) Memiliki mekanisme KYC yang sistematis yang dapat memberikan informasi yang merefleksikan profil ekspektasi *risk return*.
 - 2) Memiliki manajer investasi yang memahami secara baik kebutuhan dan ekspektasi nasabah IAH
 - 3) Senantiasa menginformasikan kepada komite *governance* strategi investasi yang diterapkan LKS
- LKS perlu menginformasikan kepada nasabah IAH bila menerapkan kebijakan

Dilihat dari sisi fungsi dan operasionalnya, bank syariah memiliki sejumlah perbedaan dengan perbankan konvensional dalam hal hubungan bank dengan *stakeholders*-nya dalam rangka penerapan *corporate governance*-nya. Chapra dan Ahmed (2002) telah mengidentifikasi sejumlah pihak-pihak yang terkait penting dalam *corporate governance* bank syariah, peran dan permasalahan penting yang terkait dengan fungsi mereka sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Pihak yang Berkepentingan dalam *Corporate Governance* Bank Syariah

<i>Stakeholders</i>	Permasalahan Penting terkait GCG	Tanggung Jawab dalam GCG Bank Syariah
A. Lingkungan Usaha		
Sistem Ekonomi, Keuangan dan Hukum secara umum	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem hukum yang efisien • Kontrak / akad yang berkekuatan hukum kuat • Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan lingkungan usaha dan hukum yang kondusif bagi GCG

Tabel 2.4 Pihak yang Berkepentingan dalam *Corporate Governance* Bank Syariah (lanjutan)

<i>Stakeholders</i>	Permasalahan Penting terkait GCG	Tanggung Jawab dalam GCG Bank Syariah
Pemerintah/Otoritas Perbankan (Hukum dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS))	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan Perundang-undangan yang mendukung operasi LKS sesuai karakteristiknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan system hukum dan peraturan yang lengkap dan jelas sesuai kebutuhan LKS
Sistem Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Standar akuntansi dan audit yang mendukung penyampaian informasi keuangan yang jelas dan transparan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan standar akuntansi yang seragam, jelas dan transparan
B. Lembaga Publik		
Pengawas Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem keuangan syariah yang sehat dan stabil (risiko sistemik rendah) • Tersedianya <i>best practice</i> pengawasan intern, pengelolaan risiko dan standar transparansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan panduan <i>best practice</i> bagi LKS • Mengawasi seluruh operasional LKS secara umum dan perilaku berisiko tinggi secara khusus
Asosiasi Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya standar minimum GCG 	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang prinsip/kode etik dan panduan dasar operasi yang sehat
C. Lembaga Bank		
Pemilik	<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dan hak pemilik • Hak memperoleh bagian laba usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan dewan direksi melalui RUPS
Dewan Direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya tim manajemen yang handal • Pengawasan aktivitas manajemen • Kepentingan dan hak-hak pemilik dan deposan terlindungi 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan kebijakan dan strategi usaha • Akuntabilitas pengelolaan bank
Manajemen Senior Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Efisiensi kegiatan operasi • Keseimbangan antara risiko dan keuntungan • Struktur insentif yang efisien 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dewan direksi secara sehat dan bertanggung jawab

Tabel 2.4 Pihak yang Berkepentingan dalam *Corporate Governance* Bank Syariah (lanjutan)

Stakeholders	Permasalahan Penting terkait GCG	Tanggung Jawab dalam GCG Bank Syariah
Auditor Intern (SKAD)	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi manajemen dan keuangan yang lengkap dan berkualitas • Transparansi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dewan direksi terlaksana dengan baik (patuh)
Pegawai Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Skill / professional dan menerapkan etika kerja yang baik • Struktur insentif yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan manajemen • Meminimalkan risiko operasional
Dewan Syariah Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya ketentuan dan prinsip syariah yang terkait operasional bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau kepatuhan pelaksanaan ketentuan syariah
D. Pihak terkait lainnya		
Deposan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan yang baik • <i>Return</i> yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tanggung jawab dengan baik • Turut mengawasi kinerja bank
Auditor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi manajemen dan keuangan yang lengkap dan berkualitas • Transparansi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi akurasi, mutu dan kecukupan informasi
Auditor Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan pada ketentuan Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • Meyakinkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah yang ditetapkan badan/otoritas syariah

Sumber: Chapra dan Ahmed (2002)

Berdasarkan uraian Chapra dan Ahmed tersebut diatas, bahwa alasan dasar dari keberadaan bank syariah yang utama adalah keinginan untuk mewujudkan sistem perbankan yang tidak bertentangan dan sejalan dengan syariah Islam tidak hanya terbatas untuk kepentingan deposan dan pemegang saham saja, akan tetapi untuk seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu dalam pengaturan *corporate governance* di bank syariah diperlukan jaminan bahwa konflik kepentingan yang mengabaikan kepentingan hak umat muslim dalam perbankan syariah memerlukan perhatian yang khusus.

Pelaksanaan pengeturan *corporate governance* di perbankan syariah tersebut dalam praktek tidak dapat murni dilaksanakan, hal ini mengingat perbankan syariah telah menjadi lembaga keuangan dimana operator, regulator,

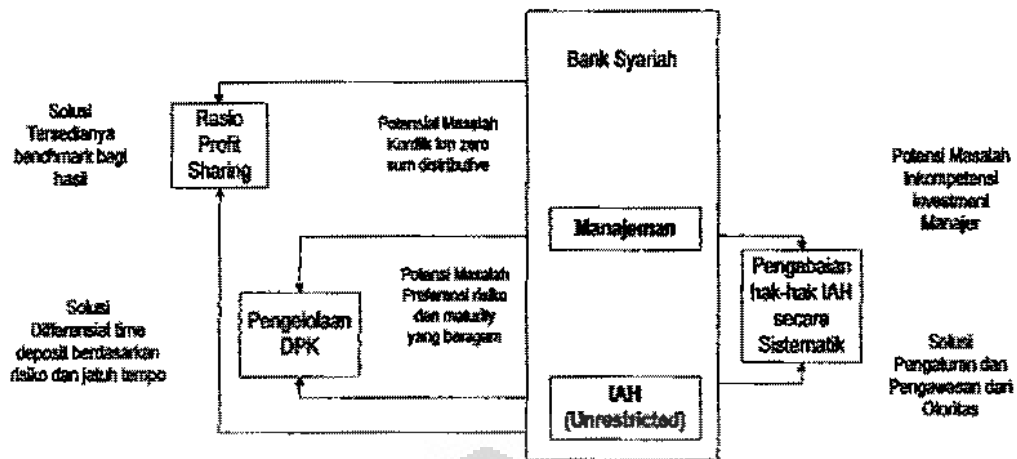
dan pengguna melibatkan muslim dan non-muslim sehingga penerapan *corporate governance* harus bersifat *practical* dan tidak terlalu spesifik menjadikan umat Islam sebagai satu-satunya *stakeholders* perbankan syariah.

Secara umum terdapat dua besaran pokok perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu:

1. Pentingnya jaminan pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam seluruh transaksi perbankan syariah, dan
2. Posisi nasabah funding khususnya pemegang rekening (*Investment Account Holders/IAH*) yang menyerupai pemegang saham karena kontrak yang digunakan dalam mobilisasi dana sebagian besar menggunakan pola bagi hasil.

Pola hubungan antara bank dan deposan bank tersebut memiliki konsekuensi *agency problem* yang unit yang sedikit berbeda dari konsepsi yang dikembangkan dalam system keuangan konvensional. Misalnya kondisi dimana deposan bank tidak boleh turut campur tangan dalam pengelolaan bank berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara bank dengan deposan. Permasalahan serupa juga terjadi dalam perbankan konvensional, akan tetapi pada bank konvensional pemilik bank memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan menggunakan kekuasaannya dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Secara umum dari sisi pandang kepentingan nasabah deposan dengan sistem bagi hasil (misalnya skim *mudharabah*), terdapat sejumlah potensi permasalahan yang diakibatkan oleh aturan yang dimuat dalam ketentuan dasar *mudharabah* yang membatasi kekuasaan deposan untuk memonitor dan campur tangan dalam kegiatan bank, sementara itu akad *mudharabah* memberikan kewenangan yang besar bagi bank dalam kaitan menetapkan segala keputusan dan dewasa ini kondisi tersebut diperumit lagi dengan kurangnya keterbukaan pelaporan keuangan bank kepada *public*. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana kepentingan deposan dapat dilindungi dalam struktur *governance* bank syariah. Keunikan operasional perbankan syariah jelas memerlukan struktur, mekanisme dan *output governance* yang sesuai agar kepentingan IAH tersebut dapat terlindungi dengan baik.



Gambar 2.1 Potensi Konflik Kepentingan Antara IAH, Pemegang Saham Dan Pengelola Pada Bank Syariah Serta Penyebabnya
Sumber Nienhaus (2003)

Dari diagram diatas dengan memandang posisi deposan bank syariah (IAH) yang memiliki kesamaan dengan nasabah *collective investment scheme (CIS)* maka terdapat sejumlah potensi konflik kepentingan yang unik dari perbankan syariah disamping permasalahan *agency problem* sebagaimana terjadi dalam bank konvensional. Potensi permasalahan tersebut adalah *pertama* hubungan antara IAH dengan manajemen bank terkait dengan hak penuh pembuatan keputusan investasi dalam pengelolaan maupun dari aspek kompetensi/keahlian pengelolaan investasi. *Kedua*, Potensi konflik kepentingan antara IAH dengan pemegang saham, karena secara umum return dari pengelolaan dana secara *pool of fund* akan dibagi dihasilkan diantara kedua belah pihak tersebut, fenomena konflik *zero sum distributive* potensial berakibat pihak yang memiliki kekuasaan akan mendahulukan kepentingan dirinya sendiri.

2.3 Konsep Kinerja Keuangan Perbankan

Tingkat kinerja keuangan perbankan tidak lepas dari penilaian tingkat kesehatan perbankan. Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas pengawasan bank.

Menurut Riyadi (2006: 169) tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI. Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan mengenai penilaian kesehatan bank, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang merupakan penyempurnaan dari sistem penilaian sebelumnya mengatur beberapa faktor-faktor yang menentukan tingkat kesehatan bank meliputi: (a) Permodalan; (b) Kualitas Aktiva Produktif; (c) manajemen dengan penekanan pada manajemen umum dan manajemen risiko; (d) Rentabilitas; (e) Likuiditas; dan (f) pelaksanaan ketentuan lain yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank.

Selanjutnya untuk mengakomodasi perbedaan operasional dari bank syariah, untuk menilai kesehatan bank syariah BI mengeluarkan ketentuan baru. Metode penilaian baru tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Tingkat Kesehatan Bank Syariah dalam PBI tersebut dijelaskan bahwa adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui hal sebagai berikut:

(1) Penilaian Terhadap Faktor-Faktor Permodalan (*Capital*)

Dalam menilai faktor permodalan yang ditetapkan BI, penilaian meliputi komponen-komponen: (a) kecukupan, proyeksi (trend ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam meng-cover risiko; dan (b) kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham

(2) Penilaian Terhadap Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian terhadap faktor kualitas aset meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (a) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti; dan (b) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji

ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

(3) Penilaian Rentabilitas (*Earning*) Perusahaan

Penilaian terhadap faktor rentabilitas mencakup penilaian terhadap: (a) kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi; dan (b) diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.

(4) Penilaian Tingkat Likuiditas (*Liquidity*) Perusahaan

Penilaian terhadap faktor likuiditas mencakup: (a) kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan; dan (b) kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.

(5) Penilaian Tingkat Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian terhadap faktor sensitivitas terhadap risiko pasar difokuskan terhadap komponen-komponen: (a) kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan (b) kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

(6) Penilaian Kualitatif Terhadap Faktor Manajemen (Management).

Penilaian terhadap faktor manajemen meliputi penilaian terhadap komponen-komponen: (a). Kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS; dan (b) kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.

Konsep pengukuran kinerja perbankan di Indonesia, tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia sebagai regulator. Beberapa penelitian mengungkapkan

bahwa pengukuran kinerja perusahaan diukur melalui pengukuran Tobins & q serta penilaian *Return on Aset / Equity* (ROA/E). Metodologi pengukuran Tobins & q mempergunakan nilai kapitalisasi pasar suatu perusahaan, kondisi tersebut sulit dilaksanakan mengingat perbankan syariah yang ada saat ini belum merupakan emiten yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah akan lebih tepat menggunakan pengukuran melalui penilaian ROA/E.

ROA (*Return on Assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

2.4 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang langsung membahas mengenai *corporate governance scorecard* untuk perbankan syariah memang belum banyak dilakukan oleh para peneliti, namun pada bagian ini penulis berusaha memaparkan hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Suryanah tahun 2004 terhadap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta (saat ini Bursa Efek Indonesia) mengenai "Analisa hubungan *Board governance* dengan penciptaan nilai perusahaan: (studi kasus perusahaan-perusahaan tercatat di BEJ)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keragaman *board governance* emitan-emitan di BEJ, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan emiten di BEJ dalam menerapkan aturan *board governance*, mengetahui hubungan antara komposisi *board governance* perusahaan dengan nilai

perusahaan serta mengkonfirmasi penelitian terdahulu mengenai komposisi *board governance*.

Dalam penelitiannya, Siti Suryanah merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran umum komposisi *board governance* emiten di Bursa Efek Jakarta?
2. Apakah besarnya perusahaan mempengaruhi responsivitas emiten dalam menerapkan aturan mengenai *board governance*?
3. Apakah secara umum *go public* perusahaan mempengaruhi responsivitas emiten dalam menerapkan aturan mengenai *board governance*?
4. Apakah jenis industri perusahaan mempengaruhi responsivitas emiten dalam menerapkan aturan mengenai *board governance*?
5. Adakah hubungan antara komposisi *board governance* perusahaan dengan nilai perusahaan? Jika ada, bagaimanakah hubungannya dan sejalan dengan hasil penelitian (yang telah ada) yang mana?

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan komposisi *board governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang bervariasi baik yang diukur dengan ukuran keuangan, akuntansi maupun Tobin's q, dimana ada penelitian yang membuktikan keduanya berhubungan positif tetapi disisi lain ada juga hasil penelitian yang membuktikan bahwa hubungan keduanya tidak signifikan (berhubungan negatif). Peneliti berasumsi bahwa independensi, keahlian, pengetahuan anggota *board governance* berhubungan positif dengan nilai perusahaan.

Untuk menganalisis dalam menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan teknik uji *binary logistic* untuk mengetahui faktor penyebab keragaman *board governance* emiten di BEJ, serta menggunakan teknik regresi metode *Ordinary Least Square (OLS)* untuk mengetahui hubungan komposisi *board governance* dengan Tobin's q.

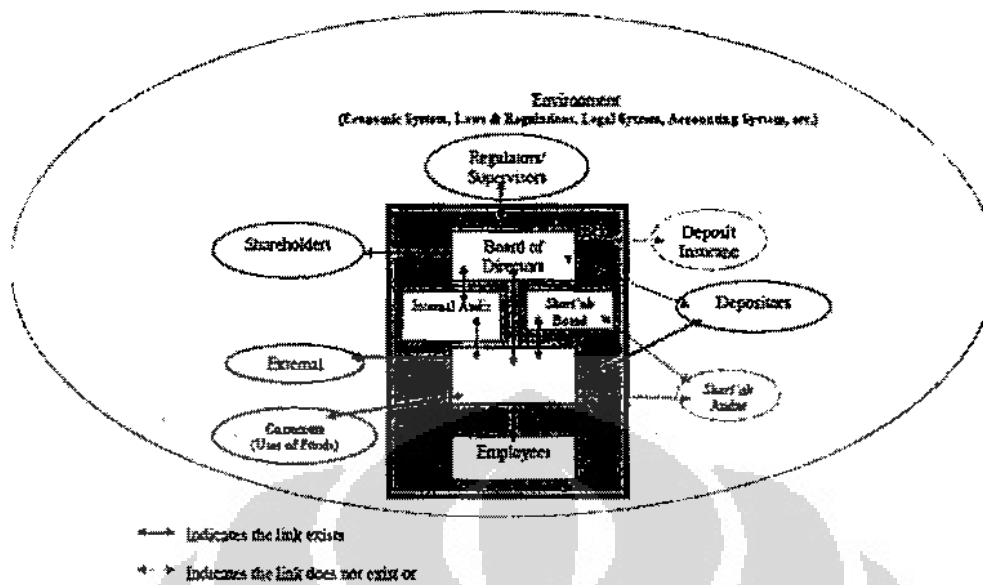
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas emiten yang terbagi berdasarkan katagori besar asset dan umur *go public* dalam mentaati aturan

mengenai struktur dan komposisi board tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan untuk hubungan *board governance* dengan nilai perusahaan, diperoleh hasil bahwa nilai perusahaan yang diperoleh dari variable karakteristik komisaris utama, komposisi komisaris independen, *gender mix* dalam dewan komisaris dan karakteristik komite audit hanya mempengaruhi nilai perusahaan sebesar 0.097%. Dengan kata lain nilai perusahaan jauh lebih banyak, yaitu 99,903% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti saudara Siti Suryanah sehingga untuk menilai kualitas *corporate governance* bank syariah harus melalui penelitian yang lebih luas dari sekedar *board governance*.

Penelitian Umer Chapra dan Habib Ahmed yang berjudul "*Corporate governance in Islamic Financial Institution*". Penelitian ini bertujuan untuk *satu*, mendiskusikan, dan meningkatkan kesadaran terhadap berbagai issue penting terkait *corporate governance* di lembaga keuangan Islam, *kedua*, memberikan pedoman yang pokok untuk meningkatkan *corporate governance* dalam istitusi tersebut sehingga memungkinkan mereka tak hanya memelihara momentum pertumbuhan dan dukungan internasional tetapi juga memberikan perlindungan kepentingan kepada semua *stakeholders*. Penelitian ini memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme *corporate governance* termasuk dewan direksi, senior manajemen, *shareholders*, DPK, regulator dan pengawas.

Umer Chapra dan Habib Ahmed mengungkapkan bahwa terdapat hubungan penting dari para pemangku kepentingan baik didalam maupun diluar dalam menciptakan *good corporate governance* di lembaga keuangan Islam, sebagaimana di gambarkan sebagai berikut :

Figure 1: Key Players in Corporate Governance of Islamic Financial Institutions



Gambar 2.2 Key player in corporate governance of financial institutions
Sumber: Chapra & Ahmed (2002)

Penelitian ini dilakukan di 30 negara termasuk melakukan interview khusus kepada 3 negara yaitu Bangladesh, Bahrain dan Sudan. Metodologi penelitian tersebut dilakukan melalui 3 tingkatan yaitu :

1. Tingkat Regulator

Penelitian ini berusaha mencari bagaimana regulator mengatur pertumbuhan dan pengawasan bank Islam melalui peraturan perundangan. Penelitian ini difokuskan kepada bank sentral masing-masing negara melalui pengiriman kuesioner.

2. Tingkat Lembaga Keuangan

Memperoleh informasi tentang *corporate governance* melalui 2 metode yaitu:

- a. Interview dengan manajemen bank Islam di negara Bangladesh, Bahrain dan Sudan.
- b. Memperoleh informasi melalui kuesioner kepada bank Islam di negara-negara lainnya

3. Tingkat Nasabah Penabung Bank Islam

Memperoleh informasi tentang *corporate governance* melalui *interview* dengan nasabah penabung bank Islam di negara Bangladesh, Bahrain dan Sudan.

Hasil penelitian Umer Chapra dan Habib Ahmed melalui ketiga tingkatan tersebut yaitu tingkat regulator, lembaga keuangan Islam, dan nasabah penabung bank Islam mendapatkan hasil yang bervariasi sebagai berikut:

1. Tingkat Regulator

Hasil survey mengungkapkan bahwa secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan dinegara yang disurvei tergolong relatif baik (73,6%), sedangkan ketentuan yang mengatur khusus tentang perbankan Islam masih membutuhkan perbaikan (46,4%). Penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa hanya terdapat sedikit perbedaan diantara keseluruhan peraturan perundang-undangan dinegara yang disurvei (standar deviasi 0,93%), dan terdapat cukup banyak perbedaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bank Islam di negara yang disurvei (standar deviasi $\sigma = 3.15$).

Dari sisi persepsi terhadap peraturan perundang-undangan diperoleh bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara peraturan bank konvensional dengan bank Islam (56,4% ketentuan sama), hal ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan yang khusus mengatur pendirian bank Islam.

2. Tingkat Lembaga Keuangan

Penelitian *corporate governance* untuk tingkat lembaga keuangan dikategorikan menjadi dua yaitu internal dan eksternal faktor. Secara keseluruhan lembaga keuangan bekerja merefleksikan hasil dari eksternal faktor (perundang-undangan, prosedur hukum, etika). Beberapa aspek internal faktor (hak pemegang saham, tanggung jawab manajemen, transparansi dan keterbukaan) di negara yang disurvei relatif lebih baik (nilai "good") dibanding internal faktor lainnya. Pelaksanaan hak stakeholders dan manajemen bank tidak berjalan dengan baik dan hanya memperoleh nilai "fair".

Survey ini juga menilai bahwa eksternal faktor perundang-undangan dan adat istiadat serta etika rata-rata memperoleh nilai "good", sedangkan untuk

prosedur hukum memperoleh nilai “*fair*”. Penelitian perbandingan antara internal & eksternal faktor menghasilkan kesimpulan bahwa internal faktor lebih baik dari eksternal faktor. Dampak dari kesimpulan ini bahwa lembaga keuangan Islam beropersasi didalam lingkungan yang tidak bersahabat.

3. Tingkat Nasabah Penabung Bank Islam

Dari penelitian ini diperoleh bahwa sebagian besar nasabah penabung bank Islam adalah orang yang relatif berpendidikan tinggi. Di Bahrain, mayoritas nasabah bank Islam berprofesi sebagai pegawai pemerintah (50%), sedangkan di Bangladesh dan Sudan mayoritas pebisnis (40,5% dan 34%). Di Bahrain dan Bangladesh, nasabah penabung bank Islam selain memiliki rekening di bank Islam juga memiliki rekening di bank konvensional (43,1% & 50,9%). Dari sudut pandang persepsi nasabah terhadap bank Islam, bahwa alasan masyarakat memilih bank Islam karena didasarkan pada usaha untuk menghindari riba (89,9% di Bahrain) dan beragam opsi di Bangladesh. Hasil dari interview dengan nasabah penabung di negara survey berkesimpulan bahwa bank Islam seharusnya membentuk aturan manajemen di bank, dimana nasabah di Bahrain sebagian besar mengartikan hal tersebut kedalam aturan didalam “*Board*” (Dewan Komisaris & Direksi), sedangkan responden di Bangladesh dan Sudan lebih mengutamakan aturan tentang kehadiran didalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Hal tersebut merupakan tuntutan dari nasabah karena nasabah dari ketiga negara survey memiliki kesamaan pandangan bahwa mereka akan “menghukum” bank bila mereka tidak menerima bagi hasil (*reward*) dengan presentase yang tidak sesuai dengan kondisi pasar.

Dari kedua penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semua *stakeholder* menginginkan peningkatan kinerja bank Islam baik peningkatan return bagi hasil maupun peningkatan efisiensi manajemen sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu modul yang dapat dipakai untuk mengukur dan memantau kualitas bank syariah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian **deskriptif - korelatif dengan metode regresi data panel**. *Descriptive research is Research designed to describe characteristics of a population or a phenomenon (Zikmund, 2003, p.55)*. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan objek yang diteliti, dan penelitian korelatif adalah penelitian yang ingin melihat hubungan antar variabel. Dua atau lebih variabel yang diteliti guna melihat hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel tersebut. Penelitian korelatif tersebut dilakukan dengan analisa regresi dengan data panel.

3.2 Objek Penelitian

3.2.1 Gambaran Populasi dan Sampel

3.2.1.1 Gambaran Populasi

Data yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2007 dan 2008. Sampai dengan akhir tahun 2007 Perbankan Syariah terdiri atas tiga bank umum syariah (BUS), 26 bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) serta 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah komposisi elemen di Perbankan Syariah bertambah menjadi 5 Bank Umum Syariah, 27 bank konvensional yang memiliki Unit usaha Syariah serta 131 Bank Perkreditan Rakyat Syariah. (LPPS BI, 2008: viii).

3.2.1.2 Gambaran Sampel dan Data Penelitian

Objek penelitian yang dijadikan sampel meliputi keseluruhan elemen perbankan syariah dikurangi Bank Perkreditan Rakyat yang aktif sejak tahun 2007 dan 2008. Alasan pemilihan sampel tanpa menggunakan Bank Perkreditan Rakyat karena

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank dengan kegiatan yang terbatas dan tidak terikat dengan peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban tata kelola bagi bank umum. Sampel data yang dijadikan objek dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha Syariah yang aktif pada tahun 2007 dan 2008.

Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan bank periode tahun 2007 dan 2008. Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi laporan pelaksanaan kegiatan tata kelola dan laporan kinerja keuangan bank syariah. Selain itu data yang diperoleh juga berasal dari hasil riset kepustakaan, serta dari berbagai literatur terkait beserta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

3.2.2 Sumber Data

Data bank yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a) **Bank Umum Syariah (BUS)**
 - 1) **Bank Syariah Muamalat Indonesia**
 - 2) **Bank Syariah Mandiri**
 - 3) **Bank Syariah Mega Indonesia**
- b) **Unit Usaha Syariah (UUS)**
 - 1) **PT Bank Negara Indonesia**
 - 2) **PT Bank Jabar**
 - 3) **PT Bank Rakyat Indonesia**
 - 4) **HSBC Ltd**
 - 5) **PT Bank Permata**
 - 6) **BPD Riau**
 - 7) **BPD Kalimantan Selatan**
 - 8) **PT Bank CIMB Niaga**
 - 9) **BPD Sumatera Utara**
 - 10) **PT Bank Ekspor Indonesia**

- 11) PT Bank Tabungan Negara
- 12) BPD Nusa Tenggara Barat
- 13) BPD Kalimantan barat
- 14) BPD Sumatera Selatan
- 15) BPD Kalimantan Timur
- 16) BPD DIY
- 17) BPD Sumatera Barat
- 18) BPD Jawa Timur
- 19) PT Bank Danamon
- 20) PT Bank Bukopin
- 21) PT Bank Internasional Indonesia
- 22) PT Bank DKI

3.2.3 Periode Penelitian

Periode penelitian yang diambil adalah periode tahun 2007 dan 2008. Alasan diambilnya periode ini sebagai sampel penelitian dikarenakan tahun 2007 merupakan tahun yang mewajibkan semua bank umum di Indonesia untuk melaksanakan bisnis berdasarkan tata kelola yang baik serta kewajiban melaporkan pelaksanaan tata kelola perusahaanya berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran nomor SE 9/12/DPNP tentang Kewajiban Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum.

3.2.4 Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel bebas apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi untuk mempengaruhi keadaan variabel lain, atau menjadi sebab terjadi atau tidaknya sesuatu.

Faktor yang merupakan *variable Independent* (variabel bebas) dari penelitian ini merupakan faktor yang dapat mencerminkan pelaksanaan tata kelola perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Faktor-faktor tersebut adalah :

Tabel 3.1 Faktor-faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No.8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006

No	Faktor – Faktor	Bobot (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	10.00
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	10.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	5.00
6	Penerapan fungsi audit intern	5.00
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5.00
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	7.50
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	7.50
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal	15.00
11	Rencana strategis Bank	5.00
	Total	100.00

Sumber: Bank Indonesia

Faktor tersebut merupakan faktor utama yang dapat mencerminkan pelaksanaan tata kelola di bank syariah, akan tetapi dalam prakteknya faktor utama tersebut pada dasarnya berasal dari penilaian beberapa sub faktor yang melingkupinya. Sub faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sub faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006

No	Sub Faktor	Jenis Data
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris a) Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris c) Efektivitas Rapat Dewan Komisaris d) Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris e) Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	Ordinal
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi a) Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi c) Efektivitas Rapat Direksi d) Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi e) Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	Ordinal
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite a) Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite b) Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite c) Efektivitas Rapat Komite	Ordinal
4	Penanganan benturan kepentingan	Ordinal
5	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	Ordinal
6	Penerapan fungsi audit intern	Ordinal
7	Penerapan fungsi audit ekstern	Ordinal
8	Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	Ordinal
9	Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan debitur besar (<i>large exposures</i>)	Ordinal
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal a) Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan b) Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> c) Kecukupan Pelaporan Internal	Ordinal
11	Rencana strategis Bank	Ordinal

Sumber : Bank Indonesia

Selanjutnya dilakukan penilaian pelaksanaan masing-masing sub faktor dan faktor tersebut melalui penilaian atas pernyataan-pernyataan yang menyusun sub

faktor tersebut berdasarkan hal-hal yang dilaporkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian untuk masing-masing pernyataan dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan rentang penilaian 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Penilaian pernyataan tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Peringkat Faktor-faktor Pelaksanaan Tata Kelola Berdasarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006

Nilai	Karakteristik
1 (satu)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi organ bank sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi dan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen berdasarkan fungsinya. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua organ bank telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Pelaksanaan rapat terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi organ bank sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku
2 (dua)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi organ bank sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi dan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen berdasarkan fungsinya. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua organ telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Pelaksanaan rapat terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi organ bank sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
3 (tiga)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi organ bank cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi dan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen berdasarkan fungsinya. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua organ cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Pelaksanaan rapat terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. • Aspek transparansi organ bank cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Tabel 3.3 Kriteria Peringkat Faktor-faktor Pelaksanaan Tata Kelola PBI No. 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006 (lanjutan)

Nilai	Karakteristik
4 (empat)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi organ bank kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi dan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua organ kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Pelaksanaan rapat terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi organ bank kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
5 (lima)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi organ tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi dan komisaris bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab semua organ tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Pelaksanaan rapat terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi organ bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

Sumber: Bank Indonesia

Setelah dilakukan penilaian terhadap sub faktor tersebut kemudian akan diambil nilai rata-rata sehingga diperoleh penilaian setiap faktor tata kelola tersebut. Hasil pembobotan tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai faktor variabel yang dalam pengujian regresi.

Sebagaimana ketentuan Bank Indonesia, bahwa penilaian menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana nilai 1 (satu) berarti bahwa pelaksanaan tata kelola faktor tersebut telah sesuai peraturan dan telah dijalankan secara efektif dan efisien, sedangkan nilai 5 (lima) berarti bahwa pelaksanaan tata kelola faktor tersebut tidak sesuai peraturan dan tidak dijalankan secara efektif dan efisien.

Universitas Indonesia

Mengingat evIEWS hanya dapat membaca skala likert dimana semakin besar nilai mengindikasikan semakin baik nilai faktor tersebut, sedangkan ketentuan Bank Indonesia mengharuskan sebaliknya. Maka dalam penelitian ini akan merubah koefisien penilaian disesuaikan dengan cara pengolahan data dengan menggunakan Eviews 4.1. Proses perubahan penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut: *pertama*, Dilakukan pembulatan bilangan penilaian yaitu beberapa nilai faktor yang sebelumnya memiliki pecahan desimal akan dibulatkan. Nilai desimal antara $0 \leq x \leq 50$ basis point akan diabaikan (bernilai 0 (nihil)), sedangkan nilai desimal antara $50 < x \leq 100$ basis point akan dibulatkan bernilai 1 (satu). *Kedua*, setelah diperoleh penilaian faktor independen yang bernilai bulat (tanpa pecahan), kemudian dilakukan proses migrasi penilaian, yaitu nilai 1 (satu) akan dirubah menjadi 5 (lima), nilai 2 (dua) dirubah menjadi 4 (empat), nilai 3 (tiga) dirubah menjadi 3 (tiga), nilai 4 (empat) dirubah menjadi 2 (dua) dan nilai 5 (lima) dirubah menjadi 1 (satu).

2. Variabel Terikat

Yaitu variabel dimana keberadaannya dipengaruhi variabel lain. Faktor yang merupakan variabel Dependen (variabel terikat) dari penelitian ini yaitu pengukuran kinerja keuangan melalui penilaian (ROA)

Faktor yang dijadikan variabel terikat dalam penelitian ini adalah rasio *Return on Assets*, yang merupakan salah satu faktor untuk mengukur kinerja perusahaan. Pada dasarnya terdapat alat lain yang juga dapat dipakai untuk melihat kinerja perusahaan yaitu pengukuran Tobin's *q*, akan tetapi pengukuran ini menggunakan nilai kapitalisasi pasar perusahaan, hal ini tidak dapat dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada bank umum syariah yang mencatatkan sahamnya di bursa sehingga nilai kapitalisasi pasar tidak tersedia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Peneliti kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu sumber informasi dari para ahli yang sifatnya teoritis yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat dipergunakan sebagai dasar perbandingan yang mendukung dalam pembahasan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku perkuliahan, penelitian literatur, dan mempelajari referensi-referensi lainnya.

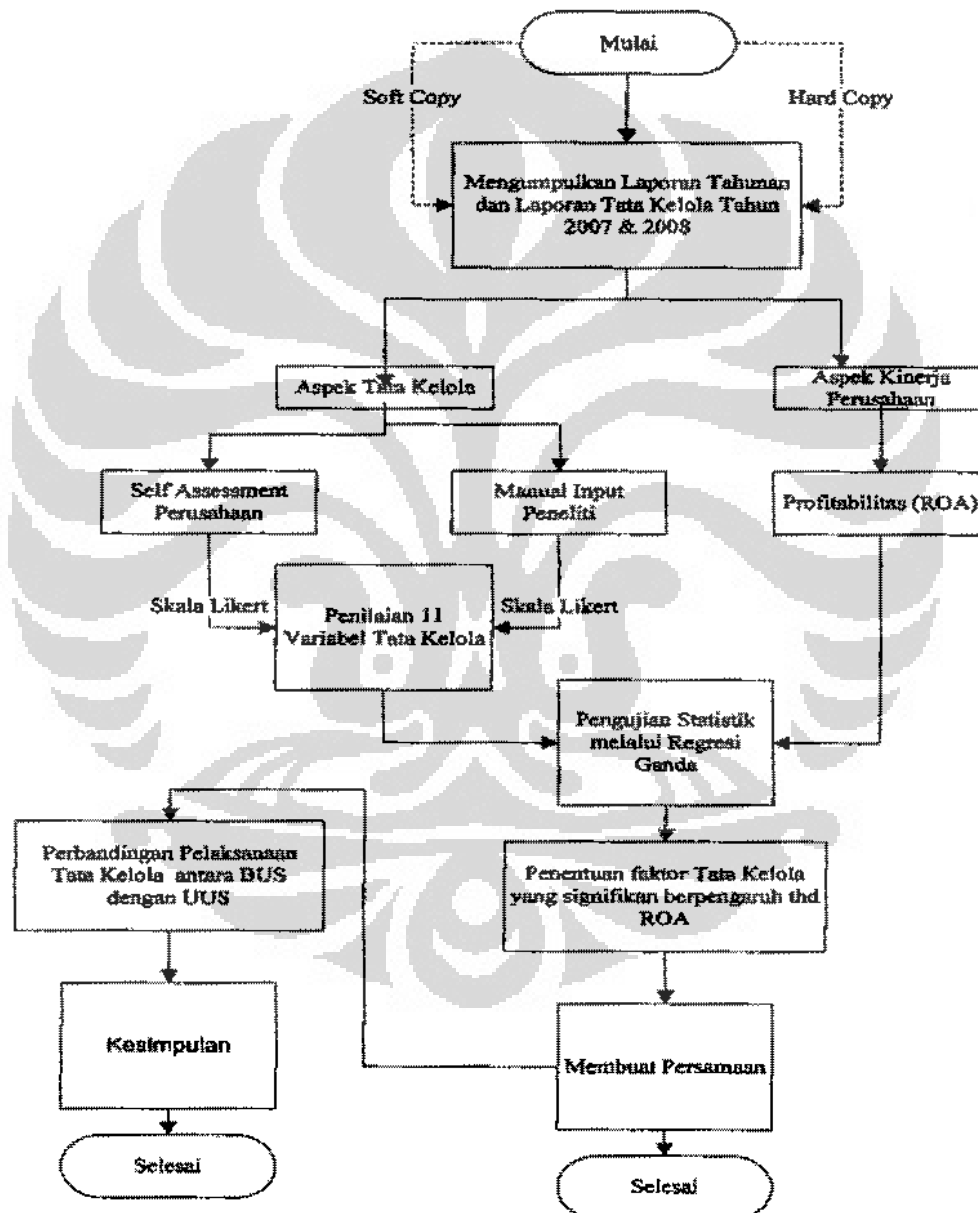
3.3.1 Penetapan Rancangan Hipotesis

Dalam melakukan analisis, tahap-tahap yang akan dilalui penulis adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi terkait laporan pelaksanaan tata kelola setiap sampel penelitian. Informasi tersebut diperoleh melalui dokumen publik perusahaan seperti laporan tahunan serta laporan tata kelola.
2. Mendapatkan dan atau mengolah data untuk memperoleh nilai dari 11 variabel bebas yang terkait dengan tata kelola. Proses memperoleh data tersebut dapat melalui dua cara yaitu *pertama*, penilaian tata kelola dari hasil self assessment perusahaan itu sendiri yang tertera dalam laporan tahunan dan atau laporan tata kelolanya, kedua, penilaian 11 variabel yang dilakukan oleh peneliti dengan menila dengan menggunakan konsep skala likert untuk setiap komponen dari masing-masing variabel berdasarkan hal-hal yang telah dilaporkan dalam laporan tahunan dan atau laporan pelaksanaan tata kelola.
3. Menghitung nilai variabel terikat yaitu rasio ROA (*Return on Asset*) yang merupakan pembagian laba bank syariah atau unit usaha syariah sebelum pajak terhadap asetnya.
4. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis serta menginterpretasikan dan menganalisis hasil pengujian hipotesis.
5. Menarik kesimpulan dari hasil pengujian statistik.

6. Selain membuat persamaan, kemudian dari faktor yang signifikan tersebut akan dilakukan perbandingan pelaksanaan dari faktor tata kelola yang signifikan tersebut antara di bank syariah dengan unit usaha syariah.
7. Menarik kesimpulan mengenai tingkat pelaksanaan tata kelola di bank syariah dengan unit usaha syariah.

Grafik berikut menggambarkan alur (*flow chart*) dari keseluruhan proses penelitian.



Gambar 3.1 Alur proses penelitian

3.3.2 Penetapan Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidak adanya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis yang akan dilakukan adalah pengujian hipotesis null (H_0) yang menyatakan bahwa koefisien regresi tidak berarti atau tidak signifikan. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa koefisien berarti atau signifikan. Jika hipotesis nol (H_0) ditolak maka hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima.

a. Secara bersama-sama atau simultan

- $H_{01} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari kesebelas faktor tata kelola terhadap ROA
- $H_{a1} : \rho$ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari kesebelas faktor tata kelola terhadap ROA

b. Secara Parsial

- $H_{02} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Dewan Komisaris terhadap ROA
- $H_{a2} : \rho$ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Dewan Komisaris terhadap ROA
- $H_{03} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Direksi terhadap ROA
- $H_{a3} : \rho$ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor Direksi terhadap ROA
- $H_{04} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor komite terhadap ROA
- $H_{a4} : \rho$ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor komite terhadap ROA
- $H_{05} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor benturan kepentingan terhadap ROA
- $H_{a5} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor benturan kepentingan terhadap ROA
- $H_{06} : \rho$ Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor audit intern terhadap ROA
- $H_{a6} : \rho$ Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-

	sama (simultan) dari faktor audit intern terhadap ROA
Ho7 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor ekstern terhadap ROA
Ha7 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor ekstern terhadap ROA
Ho8 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor manajemen risiko terhadap ROA
Ha8 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor manajemen risiko terhadap ROA
Ho9 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor pihak terkait terhadap ROA
Ha9 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor pihak terkait terhadap ROA
Ho10 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor transparansi terhadap ROA
Ha10 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor transparansi terhadap ROA
Ho11 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor strategi terhadap ROA
Ha11 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor strategi terhadap ROA
Ho12 : ρ	Tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor kepatuhan terhadap ROA
Ha12 : ρ	Terdapat pengaruh positif yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari faktor kepatuhan terhadap ROA

3.3.3 Tes Statistik dan Pengujian Tes Statistik

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, penulis menggunakan statistik parametrik berdasarkan data-data yang diperoleh. Karena variabel terikatnya dipengaruhi oleh 11 variabel bebas dengan data yang terpengaruh antar waktu (panel), maka penulis menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk perhitungan statistiknya penulis menggunakan program Eviews 4.1. Tahap pengujian hipotesis analisa regresi data panel meliputi :

1. Deskripsi dan Normalitas Data

Sebelum dilakukan uji statistik dan korelasi, perlu dilakukan terlebih dahulu deskripsi dan normalitas data yang digunakan dengan menggunakan analisis deskriptif melalui program Eviews. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak.

2. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel berguna untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X serta taksiran perubahan variabel Y untuk setiap perubahan variabel X. Persamaan regresi dengan 11 variabel bebas yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

$$ROA = \alpha + \beta_1 Dekom + \beta_2 Direksi + \beta_3 Komite + \beta_4 Conflict + \beta_5 Patuh + \beta_6 Intern + \beta_7 Ekstern + \beta_8 Risk + \beta_9 Related + \beta_{10} Trans + \beta_{11} Strategi + \epsilon \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana:

ROA	: Return on Assets
Dekom	: Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris
Direksi	: Pelaksanaan tugas Direksi
Komite	: Efektifitas pelaksanaan tugas Komite
Conflict	: Ada tidaknya benturan kepentingan perbankan syariah
Patuh	: Penerapan fungsi kepatuhan dan kepatuhan syariah
Intern	: Penerapan fungsi Audit Interen
Ekstern	: Penerapan fungsi Audit ekstern
Risk	: Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
Related	: Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
Trans	: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
Strategi	: Rencana strategis Bank

Koefesien α merupakan konstansta, sedangkan koefesien β_1 sampai dengan β_{11} merupakan koefesien untuk masing-masing variabel bebasnya. Perlu diingat bahwa diantara koefesien β tidak saling mempengaruhi dan menganggap koefesien yang lain dianggap konstan. Sedangkan nilai ϵ merupakan faktor lain yang mempengaruhi akan tetapi tidak menjadi objek penelitian ini.

3.3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan ialah regresi Panel Data dengan *Pooled Least Squares model*, penggunaan panel data *Pooled Least Squares model*, karena data yang digunakan terdiri dari data *time series* (data tahunan selama 2 tahun yaitu 2007 dan 2008) dan data *crosssectional* (25 perusahaan yang dianalisis) yang kombinasinya merupakan panel data.

Dasar pertimbangan penggunaan panel data, menurut Baltagi, 2001, ada beberapa kelebihan panel data, yaitu :

- Teknik estimasi panel data dapat secara eksplisit menarik heterogenitas dalam perhitungan dengan membiarkan variabel spesifik dari unit-unit yang diteliti.
- Memberikan data yang lebih informatif, lebih variabilitas, kurang kolinearitas diantara variabel – variabel, derajat kebebasan yang lebih, dan lebih efisien.
- Panel data akan lebih cocok untuk mempelajari perubahan yang dinamis.
- Bisa secara lebih baik mendeteksi dan mengukur akibat-akibat, yang tidak dapat dilakukan oleh *cross-section* dan *time series* data.
- Memungkinkan untuk mempelajari model-model perilaku yang lebih rumit.
- Bisa meminimalisasikan bias yang mungkin terjadi bila kita mengelompokkan unit-unit yang diteliti kedalam satu kumpulan luas.

3.4 Pengujian *Pooled Least Squares Model* dan *Fixed Effects Model*

Setelah digunakan *Pooled Least Squares model*, kemudian dilakukan uji coba dengan menggunakan *fixed effect model* untuk melihat alternative model yang lebih baik. Analisis data panel *fixed effect* dengan *time specific* memasukan dampak dari unsur waktu dengan pertimbangan dalam perjalanan waktu bisa saja terjadi perubahan perubahan seperti peraturan pemerintah, kebijaksanaan pajak, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Untuk mengukurnya maka digunakan *time dummies*, satu untuk setiap periode. Oleh karena jumlah tahun yang ada sebanyak t , maka harus digunakan sebanyak $t-1$ *dummies*

Persamaannya akan menjadi sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \dots + \alpha_{t-1} D_{t-1} + \alpha_{i1} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \dots + \alpha_n X_{nit} + U_{it} \dots (1.4)$$

Dimana :

α_0 = nilai intersep untuk periode ke t (tahun dasar)

α_1 = nilai intersep untuk periode ke 1

α_2 = nilai intersep untuk periode ke 2

α_3 = nilai intersep untuk periode ke 3

α_{t-1} = nilai intersep untuk periode ke t-1

$D_1 = 1$, bila observasi untuk waktu periode 1 dan = 0 untuk lainnya

$D_2 = 1$, bila observasi untuk waktu periode 2 dan = 0 untuk lainnya

$D_3 = 1$, bila observasi untuk waktu periode 3 dan = 0 untuk lainnya

$D_{t-1} = 1$, bila observasi untuk waktu periode t-1 dan = 0 untuk lainnya

Setelah model dengan menggunakan pooled square model dan fixed effect telah diperoleh, kemudian dilakukan pengujian pemilihan model. Pengujian ini dilakukan melalui uji F / Uji Chow. Pengujian dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

- H_0 = Model Pooled Least Squares
- H_1 = Model Fixed Effect
- Uji F-test dirumuskan dengan:

$$F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{(1 - R^2_{UR}) / df}$$

Dimana:

R^2_{UR} = R-squared Fixed effect

R^2_R = R-squared Pooled Least Squares

Df = $N * T - (N + K)$

- Nilai F tabel dengan df for numerator yang sama .
- Kemudian dilakukan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F Tabel, maka model yang lebih baik adalah model dengan *fixed effect method*.

3.4.1 Pengujian Asumsi Regresi Linier

Secara teoritis, model-model ekonometrika akan menghasilkan nilai parameter model penduga yang valid bila asumsi dari *Classical Linear Regression Model* (CLRM) terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Nilai rata-rata dari u_i adalah nol, atau $E(u_i | X_{2i}, X_{3i}) = 0$ untuk tiap i

2. Tidak ada "Serial Correlation", atau $cov(u_i, u_j) = 0$, i tidak sama dengan j
3. "Homoscedasticity", atau $var(u_i) = _2$
4. Tidak ada "Specification Bias" atau model dispesifikasi secara benar
5. Tidak ada "Exact Collinearity" di antara variabel-variabel independen (X)

Jika model regresi melanggar salah satu asumsi regresi linier di atas maka model akan diperbaiki dengan menggunakan teknik-teknik ekonometrika yang ada.

3.4.2 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2), digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. Nilai R^2 sama dengan atau mendekati 0 (nol) menunjukkan variabel dalam model yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Penghitungan R^2 diperoleh dari :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum(\hat{Y}_t - \bar{Y})^2}{\sum(Y_t - \bar{Y})^2}$$

dimana ESS = *Explained sum of square*
TSS = *Total sum of square*

3.4.3 Uji Parsial/t-Statistik

Uji t statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara parsial. Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesa :

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas

H_a = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas

Dengan menguji dua arah dalam tingkat signifikansi $=\alpha$ dan $df = n - k$ ($n =$ jumlah observasi, $k =$ jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukkan :

H_0 tidak ditolak bila $t_{statistik} < t_{tabel}$

H_0 ditolak bila $t_{statistik} > t_{tabel}$

3.4.4 Uji Simultan/F-Statistik

Uji F-statistik ialah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan. Jika dalam pengujian kita menerima H_0 maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara dependen variabel dengan independen variabel. Untuk mendapatkan Nilai F-statistik, digunakan tabel ANOVA (*analysis of variance*) seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3. ANOVA

Sumber Variasi	Sun of Squares (SS)	Degree of Freedom	Mean Square	Fischer Test
Akibat Regresi	ESS	k-1	EMS=ESS/df	
Akibat Residual	RSS	n-k	RMS=RSS/df	F=EMS/RMS
Total	TSS	n-1		

Sumber : Gujarati (2003)

Keterangan

ESS: *Explained sum square*

EMS: *Explained mean squares*

RSS: *Residual sum square*

RMS: *Residual mean squares*

TSS: *Total sum square*

Uji F-statistik biasanya berupa :

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas

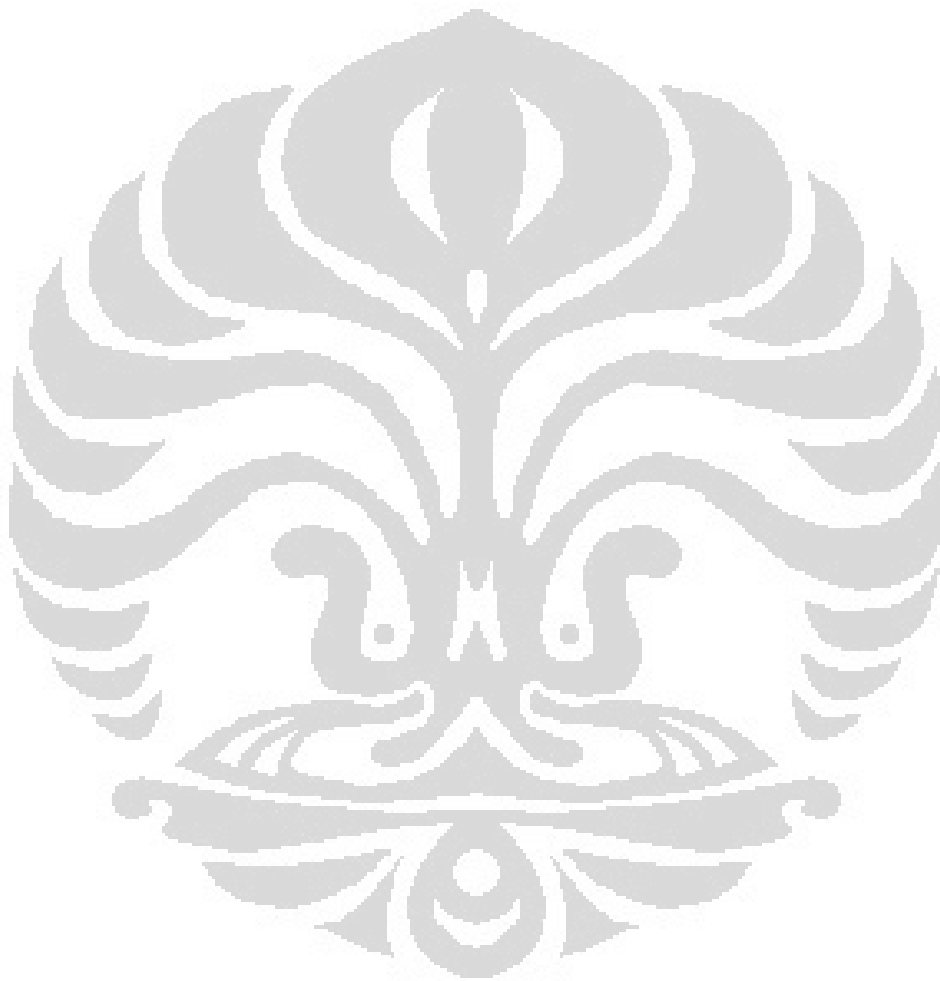
H_a = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas

Dengan menguji tingkat signifikansi $=\alpha$ dan $df = n - k$ ($n =$ jumlah observasi, $k =$ jumlah parameter) maka hasil pengujian akan menunjukkan :

H_0 ditolak bila $F_{statistik} > F_{tabel}$

3.4.5 Penarikan Kesimpulan

Dari hipotesa yang telah ada, kita dapat menarik kesimpulan apakah variabel bebas secara simultan atau secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat, dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Dalam hal ini ditandai dengan penolakan H_0 atau penerimaan H_a .



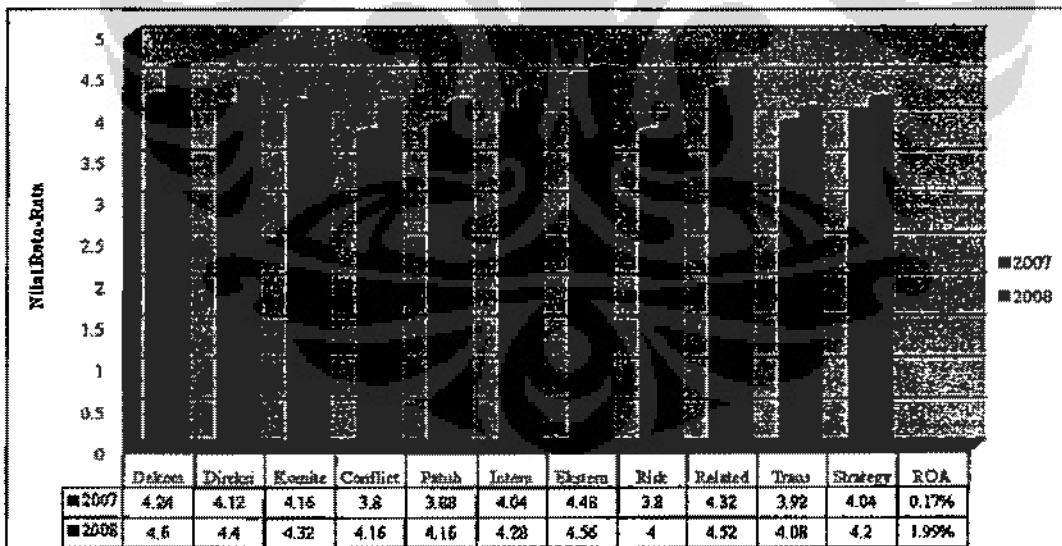
BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN FAKTOR TATA KELOLA

Sebelum dilakukan analisis model dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan deskripsi data terhadap seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Deskripsi data dilakukan untuk melihat posisi dan sebaran data yang dipakai mengingat data pelaksanaan tata kelola ini diambil dari laporan self assessment masing-masing bank syariah serta bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

4.1 Deskripsi Data

Deskripsi data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat normalitas variabel yang digunakan serta melihat perkembangan pelaksanaan tata kelola perbankan syariah dari tahun 2007 dan 2008. Rekap perkembangan penilaian faktor tata kelola perbankan syariah dapat terlihat dari tabel berikut:



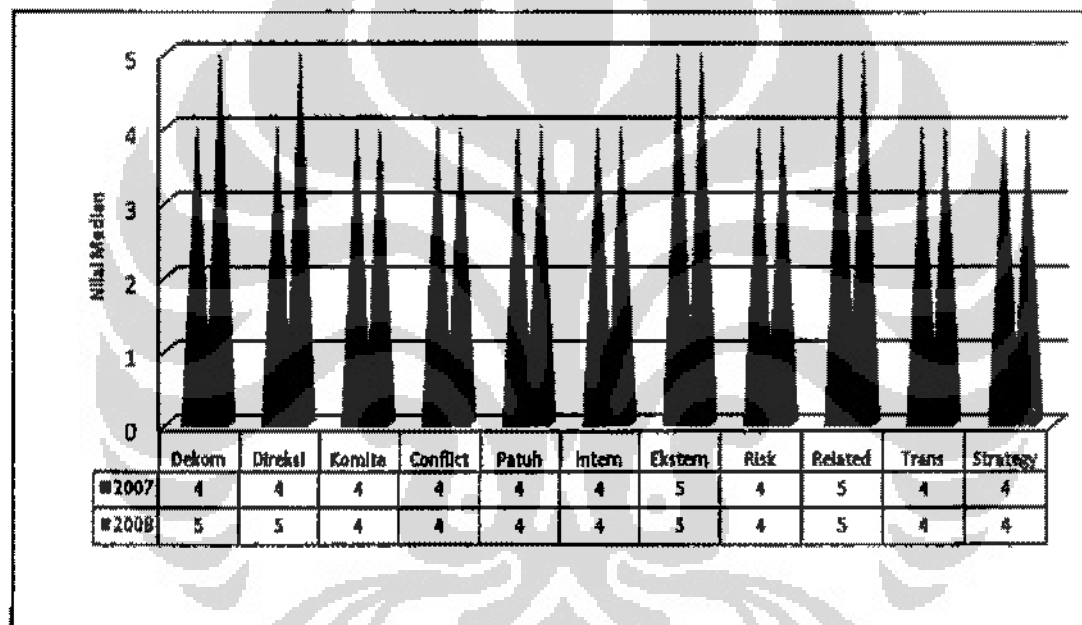
Grafik 4.1. Rekap Perkembangan Penilaian Faktor Tata Kelola Perbankan Syariah.

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan tabel diatas, bahwa secara keseluruhan rata-rata nilai faktor tata kelola perbankan syariah dalam kategori baik. Sejak tahun 2007 dan 2008 perbankan syariah juga mengalami peningkatan nilai rata-rata pelaksanaan faktor

tata kelola yang cukup signifikan. Dari pelaksanaan faktor tata kelola tersebut, pelaksanaan faktor tata kelola audit ekstern pada tahun 2007 memiliki nilai yang tertinggi, sedangkan pada tahun 2008, pelaksanaan faktor tugas dan tanggung jawab dewan komisaris merupakan faktor tata kelola yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Diantara pelaksanaan tata kelola faktor yang lain, pelaksanaan manajemen risiko merupakan faktor yang memiliki nilai terendah secara berturut-turut sejak tahun 2007 dan 2008.

Apabila dilihat dari sisi penyebaran data, maka secara umum penyebaran data tidak terdistribusi normal, hal ini dapat terlihat dari tabel berikut ini:

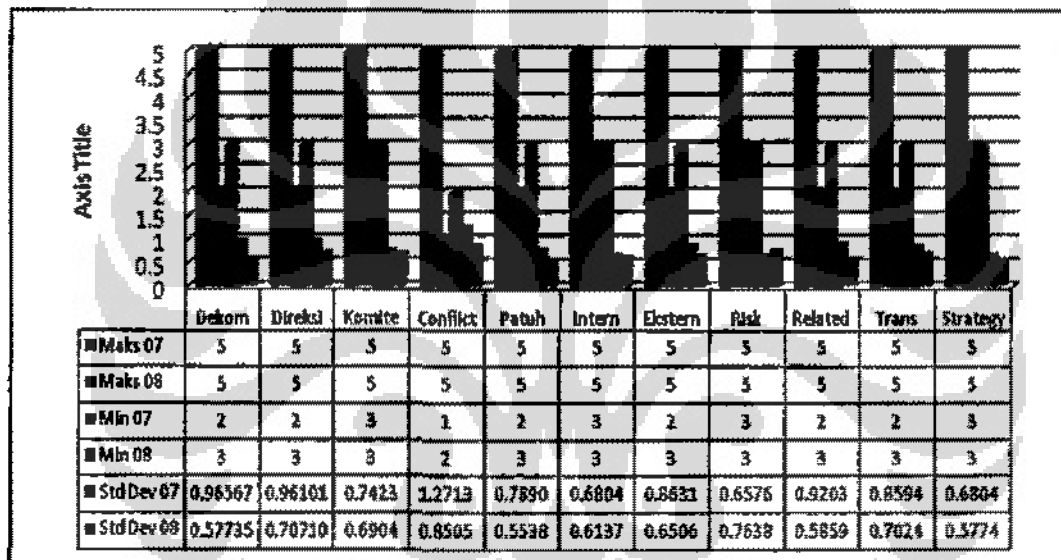


Grafik 4.2 Rekap Perkembangan Median Faktor Tata Kelola Perbankan Syariah
Sumber: Data primer, diolah

Mengingat bahwa penilaian tata kelola dilakukan dengan menggunakan skala likert antara 1 – 5, maka data akan terdistribusi normal apabila memiliki nilai tengah “3”. Dari tabel diatas, terlihat bahwa semua faktor tata kelola memiliki nilai tengah antara 4 dan 5 sehingga data tidak terdistribusi normal. Dalam pengujian deskriptif dengan menggunakan program Eviews 4.1 juga terlihat bahwa data tidak terdistribusi normal, hal ini dibuktikan dengan nilai Jarque-Bera yang selalu positif.

Data yang tidak terdistribusi normal bukan merupakan tanda bahwa data yang ada tidak mencerminkan populasi dalam penelitian, akan tetapi data yang tidak terdistribusi normal (kecenderungan ke kanan) dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa setiap elemen dalam perbankan syariah telah memiliki *awareness* dan komitmen yang cukup tinggi untuk menjalankan usaha berdasarkan prinsip tata kelola melalui pelaksanaan tugas setiap faktor tata kelola.

Selanjutnya, dalam tabel dibawah ini kita akan melihat data dari sisi nilai maksimal, minimal dan standar deviasi. Tujuan melihat data dari sisi ini yaitu untuk melihat faktor apa saja dari pelaksanaan tata kelola yang belum dijalankan dengan baik sehingga memerlukan pembenahan terlebih dahulu.



Grafik 4.3 Rekap nilai Maksimal, Minimal, dan Standar Deviasi
Sumber: Data primer, diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua faktor memiliki nilai maksimal yang sama yaitu "5" sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap faktor telah memiliki "Role Model" yang dapat dijadikan contoh bagi objek perbankan syariah lain yang belum memiliki nilai sempurna.

Dari sisi nilai minimal, bahwa faktor penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) merupakan faktor yang paling memiliki nilai terendah dalam tahun 2007 dan tahun 2008 sehingga merupakan faktor yang memerlukan prioritas pembenahan. Sedangkan faktor pelaksanaan tugas dewan komisaris, direksi, kepatuhan, audit ekstern, kebijakan *related parties*, dan *transparency* adalah faktor juga memiliki nilai rendah pada tahun 2007.

4.2 Hasil Pengolahan Data

Hasil regresi persamaan dengan data panel ialah hasil regresi yang telah terbebas dari masalah asumsi regresi linier klasik seperti masalah multikolinear dan heteroskedastisitas. Regresi dengan data panel memiliki tiga jenis yaitu Pooled Least Squares, Fixed Effect dan Random Effect.

Untuk memilih model yang terbaik perlu dilakukan pengujian yaitu dengan pengujian F-test untuk membandingkan antara regresi dengan Pooled Least Squares dan fixed effect. Apabila kemudian diperoleh hasil regresi yang lebih baik adalah *common effect* maka proses berhenti. Akan tetapi apabila kemudian diperoleh hasil regresi yang lebih baik adalah fixed effect maka perlu dilakukan perbandingan dengan hasil regresi dengan random effect menggunakan Uji Hausman.

Adapun hasil regresi ialah sebagai berikut :

1. Output Hasil Pengolahan Data Panel *Pooled Least Squares*

Tabel 4.1 Output Hasil Pengolahan Data Panel *Pooled Least Squares*

Dependent Variable: ROA?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/04/10 Time: 20:37				
Sample: 2007 2008				
Included observations: 2				
Number of cross-sections used: 25				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083949	0.066049	1.271017	0.2114
DEKOM?	0.040856	0.017846	2.289307	0.0277
DIREKSI?	-0.012938	0.019351	-0.668582	0.5078
KOMITE?	-0.024769	0.014559	-1.701307	0.0971
CONFLICT?	0.022252	0.010586	2.101992	0.0422
PATUH?	0.051492	0.017272	2.981168	0.0050
INTERN?	-0.018732	0.015120	-1.238894	0.2230
EKSTERN?	0.011051	0.014970	0.738240	0.4649
RISK?	-0.021543	0.011537	-1.867338	0.0696
RELATED?	-0.047340	0.014435	-3.279404	0.0022
TRANS?	0.012990	0.014087	0.922150	0.3623
STRATEGY?	-0.029087	0.015445	-1.883278	0.0673
R-squared	0.505116	Mean dependent var		0.010841
Adjusted R-squared	0.361860	S.D. dependent var		0.061354
S.E. of regression	0.049012	Sum squared resid		0.091283
F-statistic	3.525971	Durbin-Watson stat		1.802824
Prob(F-statistic)	0.001811			

Sumber: Data primer, diolah

2. Output Hasil Pengolahan Data Panel dengan *Fixed Effect*

Tabel 4.2 Output Hasil Pengolahan Data Panel Fixed Effect

Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 20:40

Sample: 2007 2008

Included observations: 2

Number of cross-sections used: 25

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DEKOM?	0.063765	0.030307	2.103961	0.0539
DIREKSI?	-0.011960	0.052932	-0.225953	0.8245
KOMITE?	0.025129	0.037794	0.664905	0.5169
CONFLICT?	0.006568	0.036028	0.182294	0.8580
PATUH?	0.015177	0.043987	0.345025	0.7352
INTERN?	0.044145	0.057665	0.765532	0.4567
EKSTERN?	-0.022018	0.025272	-0.871228	0.3983
RISK?	-0.065973	0.029048	-2.271211	0.0394
RELATED?	-0.066342	0.037425	-1.772691	0.0980
TRANS?	0.007241	0.031390	0.230670	0.8209
STRATEGY?	0.028769	0.063206	0.455168	0.6560
Fixed Effects				
_CIMB--C	-0.089607			
_BII--C	-0.134820			
_BTN--C	-0.150583			
_BUKOPIN--C	-0.131306			
_BNI--C	-0.089210			
_BRI--C	-0.150570			
_PERMATA--C	-0.033294			
_DANAMON--C	-0.090878			
_HSBC--C	-0.263445			
_BEI--C	-0.017262			
_MEGA--C	-0.077912			
_BSM--C	-0.195325			
_MUAMALAY--C	0.096721			
_DIY--C	-0.008498			
_JATIM--C	-0.096649			
_KALSEL--C	-0.234978			
_RIAU--C	-0.059101			
_JABAR--C	-0.185457			
_NTB--C	-0.038870			
_SUMSEL--C	-0.048899			
_DKI--C	-0.082849			
_SUMUT--C	-0.039440			
_KALBAR--C	-0.080608			
_KALTIM--C	-0.120677			
_SUMBAR--C	-0.047291			
R-squared	0.850716	Mean dependent var	0.010841	
Adjusted R-squared	0.477507	S.D. dependent var	0.061354	
S.E. of regression	0.044349	Sum squared resid	0.027536	
F-statistic	2.279461	Durbin-Watson stat	3.846154	
Prob(F-statistic)	0.050436			

Sumber: Data primer, diolah

3. Uji F-test

- H_0 = Model Pooled Least Squares
- H_1 = Model Fixed Effect
- Uji F-test dirumuskan dengan:

$$F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R) / m}{(1 - R^2_{UR}) / df} = \frac{(0,85 - 0,50) / 24}{(1 - 0,85) / (50 - 35)} = 1,45$$

- Nilai F tabel dengan df for numerator = 15 dan m = 24 dengan tingkat kepercayaan 5% adalah 2,29
 - Oleh karena Nilai F hitung lebih kecil dibanding F tabel, maka model kita terima H_0 dan menolak H_1 , sehingga kita memakai model Pooled Least Squares.
4. Model yang digunakan dalam penelitian

Mengingat berdasarkan uji F diperoleh bahwa model yang terbaik adalah model dengan menggunakan Pooled Least Squares. Maka hasil output pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kesimpulan Model yang digunakan dalam Penelitian

Data Panel *Pooled Least Squares*

Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 20:37

Sample: 2007 2008

Included observations: 2

Number of cross-sections used: 25

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083949	0.066049	1.271017	0.2114
DEKOM?	0.040856	0.017846	2.289307	0.0277
DIREKSI?	-0.012938	0.019351	-0.668582	0.5078
KOMITE?	-0.024769	0.014559	-1.701307	0.0971
CONFLICT?	0.022252	0.010586	2.101992	0.0422
PATUH?	0.051492	0.017272	2.981168	0.0050
INTERN?	-0.018732	0.015120	-1.238894	0.2230
EKSTERN?	0.011051	0.014970	0.738240	0.4649
RISK?	-0.021543	0.011537	-1.867338	0.0696
RELATED?	-0.047340	0.014435	-3.279404	0.0022
TRANS?	0.012990	0.014087	0.922150	0.3623
STRATEGY?	-0.029087	0.015445	-1.883278	0.0673
R-squared	0.505116	Mean dependent var		0.010841
Adjusted R-squared	0.361860	S.D. dependent var		0.061354
S.E. of regression	0.049012	Sum squared resid		0.091283
F-statistic	3.525971	Durbin-Watson stat		1.802824
Prob(F-statistic)	0.001811			

Sumber: Data primer, diolah

Dari hasil regresi di atas didapat persamaan :

$$ROA = \alpha + \beta_1 Dekom + \beta_2 Direksi + \beta_3 Komite + \beta_4 Conflict + \beta_5 Patuh + \beta_6 Intern + \beta_7 Ekstern + \beta_8 Risk + \beta_9 Related + \beta_{10} Trans + \beta_{11} Strategy + \epsilon$$

$$\begin{aligned} ROA = & 0.08 + 0.04 Dekom - 0.01 Direksi - 0.02 Komite + 0.02 Conflict \\ & (0.066049) \quad (0.017846) \quad (0.019351) \quad (0.014559) \quad (0.010586) \\ & + 0.05 Patuh - 0.01 Intern + 0.01 Ekstern - 0.02 Risk - 0.04 Related \\ & (0.017272) \quad (0.015120) \quad (0.014970) \quad (0.011537) \quad (0.014435) \\ & + 0.01 Trans - 0.02 Strategy \dots \dots \dots (4.1) \\ & (0.014087) \quad (0.015445) \end{aligned}$$

$$R^2 = 50,5\%$$

4.2.1 Penaksiran Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 dalam model penelitian ini adalah sebesar 0,505116, yang memberikan arti bahwa sebesar 50,5% perubahan ROA dipengaruhi oleh variabel-variabel independen di dalam model, sedangkan sisanya sebesar yaitu 49,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang ada diluar model.

4.2.2 Pengujian Parsial (t-stat) Regresi Panel Data

Pengujian parsial (t-stat) digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variabel dependen. Uraian di bawah ini menunjukkan nilai batas kritis untuk pengujian t-statistik dengan menggunakan probabilitas, masing-masing pada tingkat signifikansi 5% dan 10%.

Hasil pengujian setiap variabel independen dalam mempengaruhi variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Variabel independen *Dekom* memiliki t-stat sebesar 2,289307 dengan probabilitas 0,0277 (2,77%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a2} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Dekom* mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95%.

- b) Variabel independen *Direksi* memiliki t-stat sebesar -0,668582 dengan probabilitas 0,5078 (50,78%). Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi α 5% dan α 10% , sehingga hipotesis H_0 diterima dan menolak hipotesis H_{a3} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Direksi* tidak signifikan mempengaruhi ROA.
- c) Variabel independen *Komite* memiliki t-stat sebesar -1,701307 dengan probabilitas 0,0971 (9,71%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 10%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a4} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Komite* mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 90%.
- d) Variabel independen *Conflict* memiliki t-stat sebesar 2,101992 dengan probabilitas 0,0422 (4,22%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a5} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *Conflict* mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 95%.
- e) Variabel independen *Patuh* memiliki t-stat sebesar 2,981168 dengan probabilitas 0,0050 (0,5%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 1%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a6} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pelaksanaan tata kelola khususnya pengelolaan benturan kepentingan (*conflict of interest*) mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%.
- f) Variabel independen *Intern* memiliki t-stat sebesar -1,238894 dengan probabilitas 0,2230 (22,30%). Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi α 5% dan α 10%, sehingga hipotesis H_0 diterima dan menolak hipotesis H_{a7} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pelaksanaan audit internal tidak signifikan mempengaruhi ROA.
- g) Variabel independen *Ekstern* memiliki t-stat sebesar 0,738240 dengan probabilitas 0,4649 (46,69%). Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi α 5% dan α 10%, sehingga hipotesis H_0 diterima dan

menolak hipotesis H_{a8} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pelaksanaan audit eksternal tidak signifikan mempengaruhi ROA.

- h) Variabel independen *Risk* memiliki t-stat sebesar -1,867338 dengan probabilitas 0,0696 (6,96%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 10%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a9} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pelaksanaan manajemen risiko perbankan syariah mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 90%.
- i) Variabel independen *Related* memiliki t-stat sebesar -3,279404 dengan probabilitas 0,0022 (0,22%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 1%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a10} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel penanganan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%.
- j) Variabel independen *Trans* memiliki t-stat sebesar 0,922150 dengan probabilitas 0,3623 (36,23%). Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi α 5% dan α 10%, sehingga hipotesis H_0 diterima dan menolak hipotesis H_{a11} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial bahwa laporan tata kelola, transparansi tidak signifikan mempengaruhi ROA.
- k) Variabel independen *Strategy* memiliki t-stat sebesar -1,883278 dengan probabilitas 0,0673 (6,73%). Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi α 10%, sehingga hipotesis H_0 ditolak dan menerima hipotesis H_{a9} . Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel perencanaan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perbankan syariah mempengaruhi ROA secara signifikan dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 90%.

4.2.3 Pengujian Keseluruhan/Simultan (F-stat).

F-stat digunakan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi variabel independen. Walaupun dari hasil regresi terdapat variabel yang secara individu tidak signifikan dalam suatu persamaan tapi bila dilihat secara keseluruhan dapat memberikan signifikansi pada persamaan tersebut.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews tersebut diatas diperoleh bahwa :

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Data dengan menggunakan Eviews

R-squared	0.505116	Mean dependent var	0.010841
Adjusted R-squared	0.361860	S.D. dependent var	0.061354
S.E. of regression	0.049012	Sum squared resid	0.091283
F-statistic	3.525971	Durbin-Watson stat	1.802824
Prob(F-statistic)	0.001811		

Sumber: Data primer, diolah

Dari table tersebut diperoleh bahwa nilai F-statistic hasil regresi panel sebesar 3,525971 dengan probability F-statistic sebesar 0,001811 (0,18%). Dengan nilai probability sebesar 0,18% tersebut (lebih kecil dari α 1%, α 5% dan α 10%), maka F-statistic tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%, 95% maupun 90%, sehingga hipotesis H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama, 11 faktor tata kelola sebagai variabel independen yang digunakan di model signifikan mempengaruhi variabel dependen ROA.

4.3 Analisa Variabel Independen secara parsial terhadap Variabel Dependen

1. Pelaksanaan Tata Kelola Dewan Komisaris (*Dekom*)

Variabel pelaksanaan tata kelola fungsi dan peran Dewan Komisaris, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 95% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,040856. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Dekom* akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,040856 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Dekom* (Pelaksanaan

tugas Dewan Komisaris) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

2. Pelaksanaan Tata Kelola Direksi (*Direksi*)

Variabel pelaksanaan tata kelola fungsi dan peran Direksi, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, pada tingkat kepercayaan 99%, 95% serta 90%. Hal ini berarti perubahan pada koefisien Direksi dengan koefisien $-0,012938$ tidak berdampak terhadap perubahan ROA. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis pertama (H_0), yaitu *Direksi* (Pelaksanaan tugas Direksi) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Apabila kita coba lihat penelitian terdahulu bahwa hasil ini konsisten dengan penelitian Siti Suryanah bahwa *board governance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Tidak signifikannya pelaksanaan tata kelola direksi ini merupakan hal yang penting untuk dibahas, mengingat pelaksanaan tugas direksi ini merupakan faktor yang sangat penting untuk jalannya perusahaan disamping pelaksanaan tugas dewan komisaris. Tidak signifikannya pengaruh pelaksanaan tata kelola direksi terhadap profitabilitas perusahaan mungkin disebabkan karena panduan yang dijadikan acuan tata kelola di perbankan syariah saat ini masih berdasarkan konsep tata kelola perbankan konvensional. Oleh karena itu apabila telah ada peraturan yang mengatur mengenai tata kelola syariah seharusnya pelaksanaan tugas dan kewajiban dewan komisaris berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

3. Pelaksanaan Tata Kelola Komite (*Komite*)

Variabel pelaksanaan kerja komite, memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 90% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar $-0,024769$. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Komite* akan menurunkan nilai ROA sebesar $0,024769$ unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Komite* (Pelaksanaan tugas Komite) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Pengaruh negatif tugas komite merupakan hal yang patut dipertanyakan, hal ini mengingat komite dibentuk untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi. Pengaruh negatif *Komite* terhadap ROA dapat diasumsikan bahwa kinerja komite selama ini tidak efektif dan efisien dalam membantuk tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi bank, sehingga cenderung Dewan Komisaris dan Direksi pada prakteknya harus turun langsung menyelesaikan permasalahan yang harusnya dapat diselesaikan oleh Komite.

4. Pelaksanaan Tata Kelola Benturan Kepentingan (*Conflict*)

Variabel pelaksanaan tata kelola penanganan benturan kepentingan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 95% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,022252. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Conflict* akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,022252 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Conflict* (Penanganan Benturan Kepentingan) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Hasil ini merupakan indikasi positif bahwa penanganan benturan kepentingan dapat meningkatkan profitabilitas, sehingga dapat memberikan arahan kepada setiap perusahaan untuk berani melakukan bisnis dengan pihak dilain secara independen tanpa intervensi pihak ketiga.

5. Pelaksanaan Tata Kelola Kepatuhan (*Patuh*)

Variabel pelaksanaan tata kelola pelaksanaan fungsi kepatuhan, memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 99% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,051492. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Patuh* akan meningkatkan nilai ROA sebesar 0,051492 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Patuh* (pelaksanaan fungsi kepatuhan) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Pengaruh positif kepatuhan terhadap profitabilitas merupakan hal yang telah sesuai akal sehat. Apabila suatu perusahaan melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan rambu-rambu ketentuan yang telah ditetapkan regulator, maka perusahaan tersebut telah melanggar peraturan yang berimplikasi kepada sanksi baik itu materiil maupun imateriil. Sanksi tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mengurangi profit perusahaan serta yang lebih utama akan menurunkan kredibilitas perusahaan dimata investor.

6. Pelaksanaan Tata Kelola Audit Intern (*Intern*)

Variabel pelaksanaan tata kelola Audit Intern, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, pada tingkat kepercayaan 99%, 95% serta 90%. Hal ini berarti perubahan pada koefisien *Intern* dengan koefisien -0,018732 tidak berdampak terhadap perubahan ROA. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis pertama (H_0), yaitu *Intern* (Pelaksanaan Audit Intern) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Tidak signifikannya pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap profitabilitas perusahaan bukan berarti pelaksanaan audit internal yang saat ini dilakukan tidak berguna, melainkan mungkin pemeriksaan audit hanya terbatas pada pemeriksaan unit secara parsial dalam arti audit intern hanya bertindak sebagai polisi di internal perusahaan. Pada dasarnya konsep audit internal yang baik yaitu sebagai partner unit yang tengah diperiksa untuk meluruskan dan memberikan solusi usulan terhadap suatu permasalahan sehingga dapat berdampak terhadap peningkatan performance unit yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

7. Pelaksanaan Tata Kelola Audit Ekstern (*Ekstern*)

Variabel pelaksanaan tata kelola Audit Ekstern, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, pada tingkat kepercayaan 99%, 95% serta 90%. Hal ini berarti perubahan pada koefisien *Ekstern* dengan koefisien 0,01105 tidak berdampak terhadap perubahan ROA. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis pertama (H_0), yaitu *Ekstern* (Pelaksanaan

Audit Ekster) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Audit ekstern merupakan audit yang dilakukan oleh pihak lain (akuntan publik). Regulator mewajibkan setiap bank untuk melaksanakan audit ekstern minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun periode. Tidak signifikannya pelaksanaan tata kelola audit ekstern pada dasarnya diluar kontrol perusahaan karena memang dilaksanakan oleh pihak lain, akan tetapi perusahaan wajib mengontrol perkembangan audit tersebut mengingat bisa saja pelaksanaan audit tersebut belum efektif dan efisien. Faktor lain dilapangan juga diungkapkan bahwa banyak akuntan publik itu tidak menjalankan tugas sesuai dengan *job descriptionnya* sebagai auditor akan tetapi benar-benar akuntan publik tersebutlah yang membuat laporan keuangan perusahaan. Kondisi inilah yang membuat audit ekstern kurang berfungsi dengan baik.

8. Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen Risiko (*Risk*)

Variabel pelaksanaan Manajemen Risiko, memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 90% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar -0.021543. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Risk* akan menurunkan nilai ROA sebesar 0.021543 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Risk* (Pelaksanaan Manajemen Risiko) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Berpengaruhnya pelaksanaan tata kelola secara negatif sebagai *issue* yang sangat baik dalam ilmu pengetahuan. Saat ini setiap bank memang sedang giat-giatnya menggalakkan konsep manajemen risiko. Hal ini diwujudkan dengan adanya kewajiban sertifikasi manajemen risiko dari level 1-5 bagi semua karyawan bank. Tujuan sertifikasi tersebut untuk meningkatkan awareness manajemen risiko sehingga dapat berhati-hati dalam menyalurkan bisnis pembiayaan kepada masyarakat. Akan tetapi, terjadinya pengaruh yang signifikan secara negatif mungkin disebabkan karena bank terlalu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan sehingga terbukti saat ini terjadi penurunan nilai pembiayaan bank secara umum dan bank cenderung menyimpan dalam

instrumen yang tergolong aman yaitu Sertifikat Bank Indonesia. Tindakan bank yang cenderung menurunkan pembiayaan dan lebih memilih SBI inilah yang membuat melambatnya roda perekonomian, menurunkan peluang usaha masyarakat dan pada akhirnya menurunkan profit bank itu sendiri.

9. Pelaksanaan Tata Kelola Penanganan Pihak Terkait (*Related*)

Variabel Penanganan Pihak Terkait, memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 99% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar -0.047340. Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Related* akan menurunkan nilai ROA sebesar 0.047340 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Related* (Penanganan Pihak Terkait) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

10. Pelaksanaan Tata Kelola Keterbukaan dan Laporan Tata Kelola (*Trans*)

Variabel Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA, pada tingkat kepercayaan 99%, 95% serta 90%. Hal ini berarti perubahan pada koefisien *Trans* dengan koefisien 0.012990 tidak berdampak terhadap perubahan ROA. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis pertama (H_0), yaitu *Trans* (Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA).

Tidak signifikannya pelaksanaan prinsip keterbukaan dan laporan tata kelola terhadap profitabilitas perusahaan mungkin disebabkan karena latar belakang perusahaan melakukan pembuatan laporan tata kelola dan keterbukaan masyarakat lebih disebabkan faktor peraturan dan belum karena faktor kebutuhan akan pendapat *stakeholders* sebagai bahan memperbaiki diri. Padahal, apabila laporan dan keterbukaan tersebut dilaksanakan murni atas kebutuhan kepada *stakeholdersnya*, bukan tidak mungkin saran dan input tersebut merupakan peluang bisnis perusahaan yang dapat meningkatkan profitabilitas, selain itu saran *stakeholders* yang ditanggapi bank merupakan

poin penting bagi bank dalam meningkatkan kepercayaan kepada *stakeholders*.

11. Pelaksanaan Tata Kelola Strategi Perusahaan (*Strategy*)

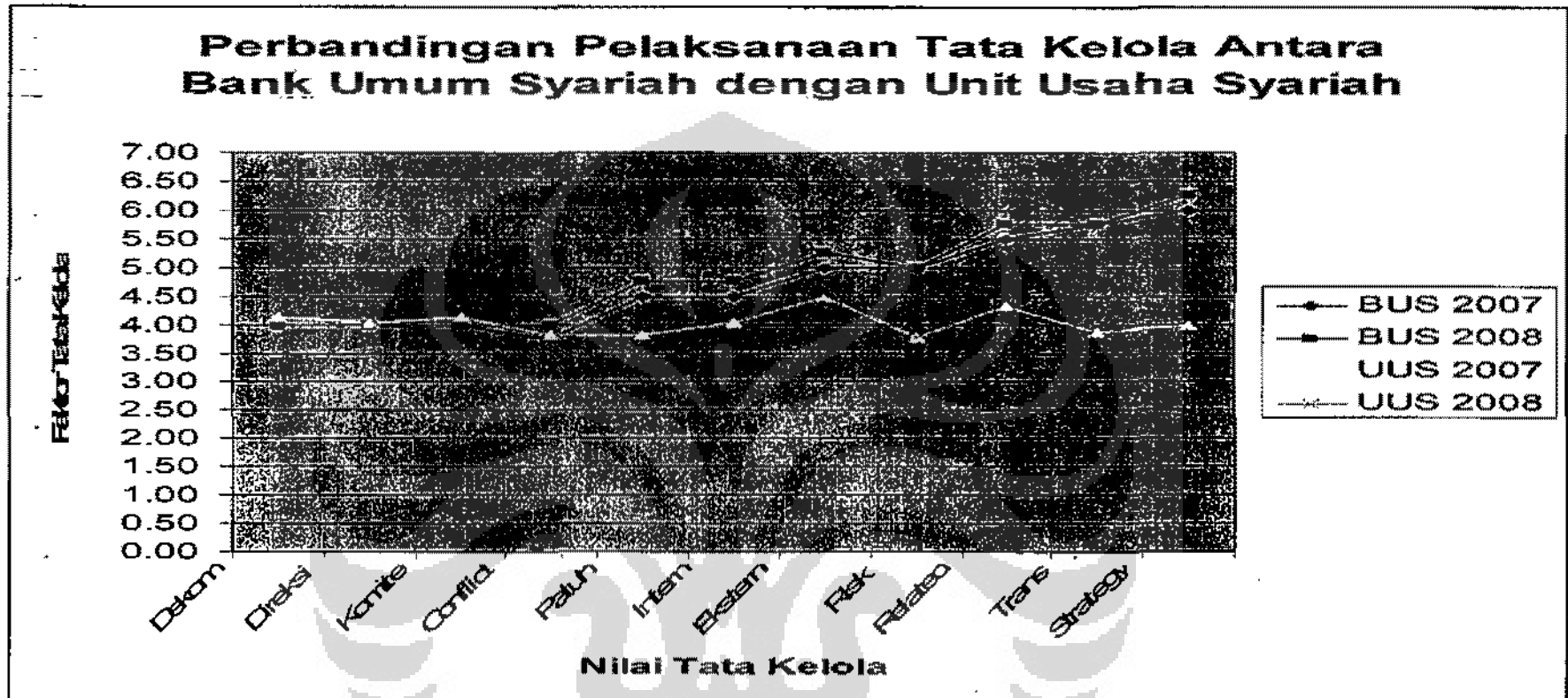
Variabel Strategi jangka pendek dan jangka panjang, memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan, pada tingkat kepercayaan 90% terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar -0.029087 . Ini memberikan arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan unit pada *Strategy* akan menurunkan nilai ROA sebesar 0.029087 unit satuan, *ceteris paribus*. Hasil ini menunjukkan hasil yang konsisten dengan hipotesis kedua (H_a), yaitu *Strategy* (Strategi jangka pendek dan jangka panjang) berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan (ROA).

4.4 Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah (UUS)

Setelah kita memperoleh persamaan regresi data panel, penulis akan mencoba membandingkan rata-rata pelaksanaan tata kelola yang telah dilakukan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbandingan ini diperlukan untuk memberikan posisi kualitas pelaksanaan tata kelola Bank Umum Syariah terhadap pelaku pasar lainnya sehingga dapat dicari langkah langkah *improvement* untuk meningkatkan tata kelola perusahaan perbankan syariah pada umumnya untuk meningkatkan keuntungan bagi seluruh *stakeholders*. Perbandingan pelaksanaan tata kelola antara bank umum syariah dengan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah dapat tercermin dalam grafik dibawah ini.

Tabel 4.5 Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola Antara Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah



Objek	Dekom	Direksi	Komite	Conflict	Patuh	Intern	Ekstern	Risk	Related	Trans	Strategy	Total	ROA
BUS 2007	5.00	4.67	4.33	3.67	4.33	4.00	4.33	4.00	4.33	4.33	4.33	47.33	2.98%
BUS 2008	5.00	4.67	4.33	4.00	4.67	4.33	4.67	4.00	4.67	4.33	4.67	49.33	1.75%
UUS 2007	4.14	4.05	4.14	3.82	3.82	4.05	4.50	3.77	4.32	3.86	4.00	44.45	-0.21%
UUS 2008	4.55	4.36	4.32	4.18	4.09	4.27	4.55	4.00	4.50	4.05	4.14	47.00	2.03%

Dari grafik diatas diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut :

1. Total Pelaksanaan Tata Kelola

Tabel 4.6 Total Perbandingan Pelaksanaan Tata Kelola

Objek	Total	ROA
BUS 2007	47.33	2.98%
BUS 2008	49.33	1.75%
UUS 2007	44.45	-0.21%
UUS 2008	47.00	2.03%

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan ta bel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 maupun 2008. Akan tetapi peningkatan kualitas tata kelola di bank umum syariah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan ROA, hal ini mungkin terjadi karena bank umum syariah sedang memperlebar pangsa pasar ke daerah-daerah yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga pada akhirnya akan menggerus laba bank.

Sedangkan disisi yang lain, meskipun kualitas tata kelola bank konvensional yang memiliki UUS tidak setinggi bank umum syariah, akan tetapi memiliki peningkatan ROA yang cukup signifikan dari sebelumnya -0,21% menjadi 2,03%. Peningkatan ROA yang cukup tinggi tersebut tidak disebabkan UUS tidak melakukan ekspansi pasar, akan tetapi ekspansi pasar yang dilakukan UUS tidak membutuhkan biaya yang besar mengingat UUS tersebut dapat menggunakan aset Bank Konvensionalnya sebagai bank induk dalam konsep *Office Channelling*, terlihat dari tabel ini bahwa strategi tersebut telah cukup berhasil untuk meningkatkan kinerja keuangan UUS.

2. Pelaksanaan Tata Kelola Dewan Komisaris

Tabel 4.7 Perbandingan Pelaksanaan Dewan Komisaris

Objek	Dewan Komisaris
BUS 2007	5.00
BUS 2008	5.00
UUS 2007	4.14
UUS 2008	4.55

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan dewan komisaris mendeklarasikan telah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang mencapai lebih dari 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata pelaksanaan fungsi dewan komisaris di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS. Disisi lain, Pelaksanaan fungsi dewan komisaris di bank umum syariah tetap mampu dipertahankan pada nilai maksimum sejak tahun 2007, sedangkan pelaksanaan fungsi dewan komisaris memiliki peningkatan yang cukup signifikan di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 sampai dengan 2008.

3. Pelaksanaan Tata Kelola Direksi

Tabel 4.8 Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Direksi

Objek	Direksi
BUS 2007	4.67
BUS 2008	4.67
UUS 2007	4.05
UUS 2008	4.36

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan direksi mendeklarasikan telah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang melebihi nilai 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata pelaksanaan fungsi direksi di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS. Disisi lain, Pelaksanaan fungsi direksi di bank umum syariah mampu dipertahankan pada posisi yang sangat baik sejak tahun 2007 walaupun belum mencapai nilai maksimal, sedangkan pelaksanaan fungsi direksi memiliki peningkatan yang cukup signifikan di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 sampai dengan 2008.

4. Pelaksanaan Tata Kelola Komite

Tabel 4.9 Perbandingan Tata Kelola Komite

Objek	Komite
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.33
UUS 2007	4.14
UUS 2008	4.32

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang melebihi nilai 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata pelaksanaan tugas komite di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS. Disisi lain, pelaksanaan fungsi komite di bank umum syariah mampu dipertahankan pada posisi yang sangat baik sejak tahun 2007 walaupun belum mencapai nilai maksimal, sedangkan pelaksanaan tugas komite mengalami peningkatan yang cukup tinggi di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 sampai dengan 2008.

5. Pelaksanaan Tata Kelola Benturan Kepentingan

Tabel 4.10 Perbandingan Tata Kelola Benturan Kepentingan

Objek	Benturan Kepentingan
BUS 2007	3.67
BUS 2008	4.00
UUS 2007	3.82
UUS 2008	4.18

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan telah cukup sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang mencapai nilai 3,67 – 4,18.

Dibanding tahun 2007, pelaksanaan kebijakan mengenai benturan kepentingan juga mengalami peningkatan baik di bank umum syariah maupun

di bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, walaupun memang pelaksanaan kebijakan di bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah secara rata-rata lebih tinggi dibanding di bank umum syariah.

6. Pelaksanaan Tata Kelola Kepatuhan

Tabel 4.11 Perbandingan Tata Kelola Kepatuhan

Objek	Patuh
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.67
UUS 2007	3.82
UUS 2008	4.09

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kepatuhan sangat baik dan telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang melebihi nilai 4.

Selama tahun 2007 dan 2008, pelaksanaan kepatuhan bank umum syariah melebihi kepatuhan bank konvensional yang memiliki UUS, terlebih sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 terjadi peningkatan kualitas kepatuhan yang cukup pesat baik untuk bank umum syariah maupun untuk bank konvensional yang memiliki UUS.

7. Pelaksanaan Tata Kelola Audit Intern

Tabel 4.12 Perbandingan Tata Kelola Audit Intern

Objek	Intern
BUS 2007	4.00
BUS 2008	4.33
UUS 2007	4.05
UUS 2008	4.27

Sumber: Data primer, diolah

Secara umum terjadi peningkatan pelaksanaan tugas audit internal di bank umum syariah maupun di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 sampai dengan 2008. Apabila kita coba lihat peningkatan perkembangannya, ternyata peningkatan kualitas audit intern bank umum syariah lebih cepat dibanding bank konvensional yang memiliki UUS. Hal ini

mengindikasikan komitmen yang kuat dari manajemen bank umum syariah untuk memperbaiki prinsip kehati-hatian dalam perusahaannya.

8. Pelaksanaan Tata Kelola Audit Ekstern

Tabel 4.13 Perbandingan Tata Kelola Audit Ekstern

Objek	Ekstern
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.67
UUS 2007	4.50
UUS 2008	4.55

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan audit ekstern perusahaan sangat baik dan telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang melebihi nilai 4.

Pada tahun 2007, kualitas audit ekstern bank umum syariah masih dibawah bank konvensional yang memiliki UUS, akan tetapi pada tahun 2008 terjadi perubahan dimana bank umum syariah memiliki kualitas audit ekstern yang lebih baik dibanding dengan kualitas audit ekstern bank konvensional yang memiliki UUS.

9. Pelaksanaan Tata Kelola Manajemen Risiko

Tabel 4.14 Perbandingan Tata Kelola Manajemen Risiko

Objek	Risk
BUS 2007	4.00
BUS 2008	4.00
UUS 2007	3.77
UUS 2008	4.00

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan dan tugas manajemen risiko telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang melebihi nilai 4.

Pelaksanaan kebijakan dan tugas manajemen risiko di bank umum syariah mampu dipertahankan pada posisi yang baik sejak tahun 2007 sampai dengan

tahun 2008, sedangkan pelaksanaan kebijakan dan tugas manajemen risiko memiliki peningkatan yang cukup signifikan di bank konvensional yang memiliki UUS sejak tahun 2007 sampai dengan 2008.

10. Pelaksanaan Tata Kelola *Related Parties*

Tabel 4.15 Perbandingan Tata Kelola Pihak Tekait (*Related Parties*)

Objek	Related
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.67
UUS 2007	4.32
UUS 2008	4.50

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara keseluruhan kebijakan perusahaan mengenai perlakuan pihak terkait telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang mencapai lebih dari 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata kebijakan perlakuan pihak terkait di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS baik tahun 2007 maupun 2008.

11. Pelaksanaan Tata Kelola *Trans*

Tabel 4.16 Perbandingan Tata Kelola Prinsip Keterbukaan dan Laporan Tata Kelola

Objek	Trans
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.33
UUS 2007	3.86
UUS 2008	4.05

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS telah melaksanakan prinsip keterbukaan serta laporan tata kelola telah disusun sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang mencapai lebih dari 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata pelaksanaan prinsip keterbukaan serta laporan tata kelola kebijakan di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS baik tahun 2007 maupun 2008.

12. Pelaksanaan Tata Kelola *Strategy*

Tabel 4.17 Perbandingan Tata Kelola *Strategy*

Objek	Strategi
BUS 2007	4.33
BUS 2008	4.67
UUS 2007	4.00
UUS 2008	4.14

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan grafik dan tabel terlihat bahwa secara bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki UUS telah memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan peraturan yang berlaku. Hal ini terpantau dari nilai mean yang mencapai lebih dari 4.

Apabila coba dibandingkan, rata-rata pelaksanaan strategi jangka pendek dan jangka panjang di bank umum syariah lebih baik dibanding dengan bank konvensional yang memiliki UUS baik tahun 2007 maupun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian faktor tata kelola secara simultan dalam regresi panel data, kesebelas faktor tata kelola secara bersama-sama mempengaruhi nilai ROA perbankan syariah dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) 99%. Sedangkan dengan pengujian parsial (*t-stat*), diketahui bahwa :
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*), pelaksanaan kepatuhan signifikan mempengaruhi nilai ROA secara positif.
 - Pelaksanaan tugas komite, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan hubungan dengan pihak terkait, dan faktor strategi bank signifikan mempengaruhi nilai ROA secara negatif.
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit ekstern, dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak secara signifikan mempengaruhi nilai ROA.
2. Pada tahun 2007 maupun 2008, pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS. Akan tetapi peningkatan kualitas tata kelola di bank umum syariah tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan ROA. Sedangkan pada bank konvensional yang memiliki UUS, meskipun kualitas tata kelolanya tidak setinggi kualitas tata kelola bank umum syariah, akan tetapi berhasil meningkatkan ROA yang sangat signifikan, yaitu dari -0,21% pada tahun 2007 menjadi 2,03% pada tahun 2008.
3. Secara umum, kualitas pelaksanaan tata kelola di perbankan syariah dalam kondisi yang baik. Terjadi peningkatan kualitas tata kelola yang cukup tinggi untuk rata-rata kesebelas faktor tata kelola pada tahun 2008

dibanding tahun 2007. Peningkatan terbesar terjadi pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan penanganan benturan kepentingan.

5.2 Saran

1. Merupakan suatu hal yang sangat baik adanya hubungan antara pelaksanaan tata kelola terhadap profitabilitas di perbankan syariah. Akan tetapi mengingat pelaksanaan tata kelola yang diterapkan di perbankan syariah saat ini masih bersumber konsep konvensional, alangkah lebih baik bila disusun suatu aturan tata kelola yang khusus untuk perbankan syariah. Konsep tata kelola tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam serta prinsip-prinsip keislaman secara keseluruhan. Hal ini penting untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.
2. Bahwa penilaian terhadap rata-rata faktor tata kelola perbankan syariah yang tergolong kategori baik merupakan prestasi yang patut dibanggakan mengingat perbankan syariah baru muncul dan diakui dalam beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi beberapa faktor yang tidak signifikan dan faktor yang signifikan akan tetapi memiliki korelasi yang berlawanan (negatif) merupakan sebagian aspek yang perlu dibenahi untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola perbankan syariah.
3. Keunggulan kualitas tata kelola bank umum syariah terhadap kualitas tata kelola bank konvensional yang memiliki UUS merupakan hal yang penting, akan tetapi setiap institusi termasuk bank umum syariah harus mengetahui urgensi penerapan tata kelola yaitu efisiensi dan efektifitas. Maka jangan sampai pelaksanaan tata kelola merupakan salah satu faktor penghambat menurunnya kinerja bank umum syariah, karena apabila itu terjadi maka sistem yang dibangun untuk mencapai kualitas tata kelola yang baik itu menjadi salah sasaran dan tidak berguna (*un usual*). Oleh karena itu sebaiknya setiap institusi harus senantiasa melakukan review berkala terhadap siste tata kelolanya agar sistem tersebut dapat mencapai tujuan awal tata kelola yaitu meningkatkan produktifitas dengan tata cara yang benar.

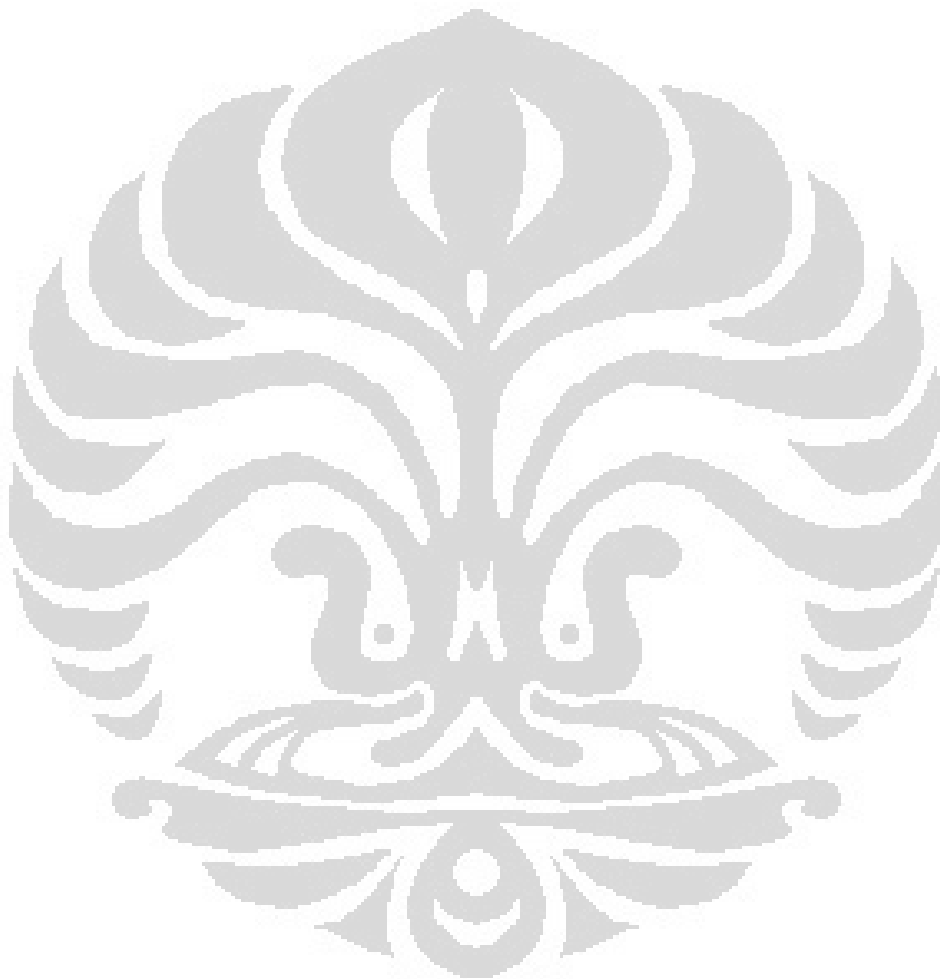
DAFTAR REFERENSI

- Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, 2006, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Ascarya & Diana Yuanita (2008). *Comparing the efficiency of Islamic Banks in Malaysia and Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, volume 11 nomor 2, Oktober 2008.
- Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2008, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2007, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah desember tahun 2008, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah desember tahun 2007, Bank Indonesia.
- Bank Indonesia, Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Kajian Perbankan Syariah No 7/6/2005, 2004
- Bank Indonesia, (2006). Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. (2007). Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Brown, Lawrence D & Caylor, Marcus L (2004). *Corporate Governance and Firm Performance*.
- Basel Committee on Banking Supervision (2006). *Enhancing corporate governance for banking organizations*. Bank for International Settlement.

- CHEUNG, STEPHEN Y.L dan JANG, HASUNG. (2006). *Scorecard on Corporate Governance in East Asia, The Centre for International Governance Innovation working paper.*
- Cihak, Martin dan Hesse, Heiko. (2008). *Islamic Banks and Financial Stability: An Empirical Analysis, International Monetary Fund Working Paper.*
- Grais, Wafik & Pellegrini, Matteo (2006). *Corporate Governance and Sharia Compliance in institution Offering Islamic Financial Services.* World bank policy research Working Paper 4054.
- Hafidhuddin, Didin dan Tanjung, Hendri, Manajemen Syariah dalam Praktek, 2003, Gema Insani Press, Jakarta
- Islamic Financial Service Board. (2006). *Exposure draft no. 3. Guiding principles on corporate governance for institutions offering only islamic financial services (excluding islamic insurance (takaful) institutions and islamic mutual funds).*
- Karim, Adiwarmanto A. (2004). Bank Islam, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, 2006, Kencana, Jakarta
- Purba, Jan Horas V. (Oktober 2004). Pengaruh Proporsi Saham Publik Terhadap Kinerja Perusahaan, Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 4 nomor 2, 109 – 116.*
- Setiawan, Aziz budi. (2009). Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Suaryana, Agung. Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-lain, 2002, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Surya, Indra dan Kustiavanda, Ivan, Penerapan *Good Corporate Governance*, Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha, 2006, Kencana, Jakarta

Suyanto, Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja BUMN (Studi Empiris Pada BUMN Di Indonesia).

Yuniasih, Ni wayan dan wirakusuma, Made gede. (2007). Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi.



Universitas Indonesia

LAMPIRAN

1. Output Regresi Dengan *Pooled Least Square Method*

Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 20:37

Sample: 2007 2008

Included observations: 2

Number of cross-sections used: 25

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083949	0.066049	1.271017	0.2114
DEKOM?	0.040856	0.017846	2.289307	0.0277
DIREKSI?	-0.012938	0.019351	-0.668582	0.5078
KOMITE?	-0.024769	0.014559	-1.701307	0.0971
CONFLICT?	0.022252	0.010586	2.101992	0.0422
PATUH?	0.051492	0.017272	2.981168	0.0050
INTERN?	-0.018732	0.015120	-1.238894	0.2230
EKSTERN?	0.011051	0.014970	0.738240	0.4649
RISK?	-0.021543	0.011537	-1.867338	0.0696
RELATED?	-0.047340	0.014435	-3.279404	0.0022
TRANS?	0.012990	0.014087	0.922150	0.3623
STRATEGY?	-0.029087	0.015443	-1.883278	0.0673
R-squared	0.505116	Mean dependent var		0.010841
Adjusted R-squared	0.361860	S.D. dependent var		0.061354
S.E. of regression	0.049012	Sum squared resid		0.091283
F-statistic	3.525971	Durbin-Watson stat		1.802824
Prob(F-statistic)	0.001811			

2. Output Regresi dengan Fixed Effect Method

Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 01/04/10 Time: 20:40

Sample: 2007 2008

Included observations: 2

Number of cross-sections used: 25

Total panel (balanced) observations: 50

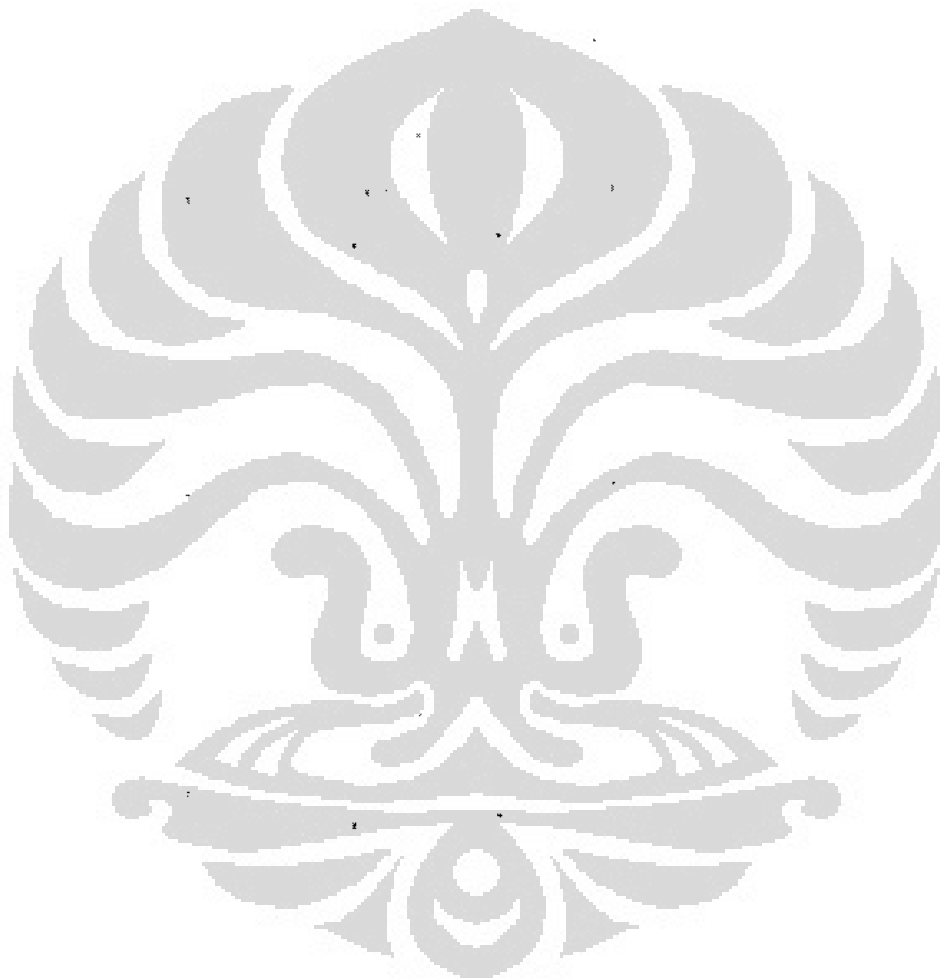
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
DEKOM?	0.063765	0.030307	2.103961	0.0539
DIREKSI?	-0.011960	0.052932	-0.225953	0.8245
KOMITE?	0.025129	0.037794	0.664905	0.5169
CONFLICT?	0.006568	0.036028	0.182294	0.8580
PATUH?	0.015177	0.043987	0.345025	0.7352
INTERN?	0.044145	0.057665	0.765532	0.4567
EKSTERN?	-0.022018	0.025272	-0.871228	0.3983
RISK?	-0.065973	0.029048	-2.271211	0.0394
RELATED?	-0.066342	0.037425	-1.772691	0.0980
TRANS?	0.007241	0.031390	0.230670	0.8209
STRATEGY?	0.028769	0.063206	0.455168	0.6560
Fixed Effects				
_CIMB--C	-0.089607			
_BI--C	-0.134820			
_BTN--C	-0.150583			
_BUKOPIN--C	-0.131306			
_BNI--C	-0.089210			
_BRI--C	-0.150570			
_PERMATA--C	-0.033294			
_DANAMON--C	-0.090878			
_HSBC--C	-0.263445			
_BEI--C	-0.017262			
_MEGA--C	-0.077912			
_BSM--C	-0.195325			
_MUAMALAY--C	0.096721			
_DIY--C	-0.008498			
_JATIM--C	-0.096649			
_KALSEL--C	-0.234978			
_RIAU--C	-0.059101			
_JABAR--C	-0.185457			
_NTB--C	-0.038870			
_SUMSEL--C	-0.048899			
_DKI--C	-0.082849			
_SUMUT--C	-0.039440			
_KALBAR--C	-0.080608			
_KALTIM--C	-0.120677			
_SUMBAR--C	-0.047291			
R-squared	0.850716	Mean dependent var		0.010841
Adjusted R-squared	0.477507	S.D. dependent var		0.061354
S.E. of regression	0.044349	Sum squared resid		0.027536
F-statistic	2.279461	Durbin-Watson stat		3.846154
Prob(F-statistic)	0.050436			

3. Output Regresi Data Panel dengan Random Effect Method

Dependent Variable: ROA?
 Method: GLS (Variance Components)
 Date: 01/04/10 Time: 21:15
 Sample: 2007 2008
 Included observations: 2
 Number of cross-sections used: 25
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.082073	0.070527	1.163717	0.2518
DEKOM?	0.042952	0.018191	2.361197	0.0234
DIREKSI?	-0.014966	0.020435	-0.732371	0.4684
KOMITE?	-0.024602	0.015306	-1.607363	0.1163
CONFLICT?	0.023992	0.011503	2.085770	0.0438
PATUH?	0.051773	0.018259	2.835531	0.0073
INTERN?	-0.016234	0.016588	-0.978699	0.3339
EKSTERN?	0.006783	0.015398	0.440504	0.6621
RISK?	-0.026800	0.012204	-2.196019	0.0343
RELATED?	-0.044689	0.015364	-2.908783	0.0060
TRANS?	0.013745	0.014635	0.939230	0.3535
STRATEGY?	-0.027352	0.016969	-1.611876	0.1153
Random Effects				
_CIMB--C	-0.008065			
_BII--C	-0.007565			
_BTN--C	0.000194			
_BUKOPIN--C	0.002296			
_BNI--C	-0.000758			
_BRI--C	-0.001120			
_PERMATA--C	0.021216			
_DANAMON--C	-0.001168			
_HSBC--C	-0.022197			
_BEI--C	-0.006145			
_MEGA--C	-0.002556			
_BSM--C	-0.021117			
_MUAMALAY--C	0.032429			
_DIY--C	0.012073			
_JATIM--C	0.008659			
_KALSEL--C	0.005721			
_RIAU--C	-0.016002			
_JABAR--C	-0.016711			
_NTB--C	-0.010183			
_SUMSEL--C	0.016306			
_DKI--C	-0.004389			
_SUMUT--C	0.007787			
_KALBAR--C	0.019459			
_KALTIM--C	0.000300			
_SUMBAR--C	-0.008463			
GLS Transformed Regression				
R-squared	0.615253	Mean dependant var	0.010841	
Adjusted R-squared	0.503879	S.D. dependant var	0.061354	
S.E. of regression	0.043215	Sum squared resid	0.070968	
Durbin-Watson stat	2.133931			
Unweighted Statistics including Random Effects				

R-squared	0.684320	Mean dependent var	0.010841
Adjusted R-squared	0.592939	S.D. dependent var	0.061354
S.E. of regression	0.039145	Sum squared resid	0.058228
Durbin-Watson stat	2.600809		



Universitas Indonesia

REKAP PELAKSANAAN GCG PERBANKAN ISLAM TAHUN 2007 DAN 2008

No	Bank	Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ROA
1	Bank CIMB Niaga	2007	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1.90%
2	Bank CIMB Niaga	2008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2.94%
3	Bank BII	2007	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2.86%
4	Bank BII	2008	1	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	3.18%
5	BTN	2007	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	0.45%
6	BTN	2008	2	2	2	1	2	1	1	2	2	2	1	0.53%
7	Bukopin	2007	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1.26%
8	Bukopin	2008	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	23.12%
9	BNI	2007	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	0.76%
10	BNI	2008	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.98%
11	BRI	2007	1	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1.65%

12	BRI	2008	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	-21.78%
13	Permata	2007	2	2	2	1	2	2	1	2	1	1	2	0.19%
14	Permata	2008	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3.66%
15	Danamon	2007	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.67%
16	Danamon	2008	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2.65%
17	HSBC	2007	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-7.16%
18	HSBC	2008	1	1	1	1	2	1	3	1	1	3	2	-8.84%
19	BEI	2007	2	2	2	3	2	2	1	1	1	3	3	0.00%
20	BEI	2008	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	9%
21	Mega	2007	1	2	2	3	1	2	1	2	1	1	1	5.36%
22	Mega	2008	1	2	2	2	1	2	1	2	1	1	1	0.98%
23	BSM	2007	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.31%
24	BSM	2008	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1.66%

25	Muamalat	2007	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.27%	
26	Muamalat	2008	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.60%	
27	DIY	2007	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2.37%	
28	DIY	2008	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	3.57%	
29	Jatim	2007	1	2	1	4	2	3	1	1	1	2	1	-7.35%	
30	Jatim	2008	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1.88%	
31	Kalsel	2007	1	3	1	4	3	2	2	3	2	1	2	0.49%	
32	Kalsel	2008	1	3	1	4	3	2	2	3	2	1	2	1.26%	
33	Riau	2007	2	2	2	1	2	2	2	3	1	2	3	2.92%	
34	Riau	2008	2	2	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3.09%	
35	Jabar	2007	1	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	3.82%	
36	Jabar	2008	1	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	4.18%	
37	NTB	2007	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	0.40%

38	NTB	2008	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3.85%
39	Sumsel	2007	4	4	3	4	3	3	4	2	4	3	2	1.06%
40	Sumsel	2008	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1.33%
41	DKI	2007	1	1	2	3	2	3	1	3	1	2	2	1.07%
42	DKI	2008	1	1	1	3	2	3	1	3	1	2	2	0.22%
43	Sumut	2007	2	2	3	3	4	3	2	2	3	4	3	-2.80%
44	Sumut	2008	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2.51%
45	Kalbar	2007	1	1	1	1	2	2	1	3	1	3	2	4.18%
46	Kalbar	2008	1	1	1	1	2	2	1	3	1	3	2	10.07%
47	Kaltim	2007	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	1.70%
48	Kaltim	2008	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2.76%
49	Sumbar	2007	4	4	3	5	3	2	1	3	1	3	3	-16.01%
50	Sumbar	2008	2	2	2	3	2	2	1	2	1	2	2	-5.54%

REKAP PELAKSANAAN GCG PERBANKAN ISLAM TAHUN 2007 DAN 2008

SETELAH DISESUAIKAN DENGAN PENGOLAHAN DATA EVIEWS 4.1

No	Bank	Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ROA
1	Mega	2007	5	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5.36%
2	Mega	2008	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	0.98%
3	BSM	2007	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.31%
4	BSM	2008	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	1.66%
5	Muamalat	2007	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2.27%
6	Muamalat	2008	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2.60%
7	CIMB	2007	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	1.90%
8	CIMB	2008	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2.94%
9	BII	2007	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	2.86%
10	BII	2008	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	4	3.18%
11	BTN	2007	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	0.45%

12	BIN	2008	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	0.53%
13	Bukopin	2007	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	1.26%
14	Bukopin	2008	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	23.12%
15	BNI	2007	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	0.76%
16	BNI	2008	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.98%
17	BRI	2007	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	5	1.65%
18	BRI	2008	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	-21.78%
19	Permata	2007	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	0.19%
20	Permata	2008	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	3.66%
21	Danamon	2007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.67%
22	Danamon	2008	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2.65%
23	HSBC	2007	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-7.16%
24	HSBC	2008	5	5	5	5	4	5	3	5	5	3	4	-8.84%

25	BEI	2007	4	4	4	3	4	4	5	5	5	3	3	0.00%
26	BEI	2008	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	9%
27	DIY	2007	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	2.37%
28	DIY	2008	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3.57%
29	Jatim	2007	5	4	5	2	4	3	5	5	5	4	5	-7.35%
30	Jatim	2008	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	1.88%
31	Kalsel	2007	5	3	5	2	3	4	4	3	4	5	4	0.49%
32	Kalsel	2008	5	3	5	2	3	4	4	3	4	5	4	1.26%
33	Riau	2007	4	4	4	5	4	4	4	3	5	4	3	2.92%
34	Riau	2008	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3.09%
35	Jabar	2007	5	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	3.82%
36	Jabar	2008	5	5	5	5	4	4	5	3	4	4	4	4.18%
37	NTB	2007	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	0.40%

38	NTB	2008	5	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3.85%
39	Sumsel	2007	2	2	3	2	3	3	2	4	2	3	4	1.06%
40	Sumsel	2008	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	1.33%
41	DKI	2007	5	5	4	3	4	3	5	3	5	4	4	1.07%
42	DKI	2008	5	5	5	3	4	3	5	3	5	4	4	0.22%
43	Sumut	2007	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	-2.80%
44	Sumut	2008	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2.51%
45	Kalbar	2007	5	5	5	5	4	4	5	3	5	3	4	4.18%
46	Kalbar	2008	5	5	5	5	4	4	5	3	5	3	4	10.07%
47	Kaltim	2007	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	1.70%
48	Kaltim	2008	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	2.76%
49	Sumbar	2007	2	2	3	1	3	4	5	3	5	3	3	-16.01%
50	Sumbar	2008	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	-5.54%

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
INDIKATOR	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none">• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;• efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;• kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;• kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi. 2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. 3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. 4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; <p>dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p> <p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p> <p>12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.</p>	
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SEMI-ASSESSMENT
<p>1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.</p> <p>2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.</p> <p>4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.</p> <p>5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/NOTE/ASSESSMENT
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. <p>pada laporan pelaksanaan GCG.</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/NOTE/ASSESSMENT
<p>1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	
KRITERIA PERINGKAT FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

¹ Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.• Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank.• Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien.• Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA	

² Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; • efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; • kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; • kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SELEKSI/ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. 2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia. 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi. 4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun). 5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam 	

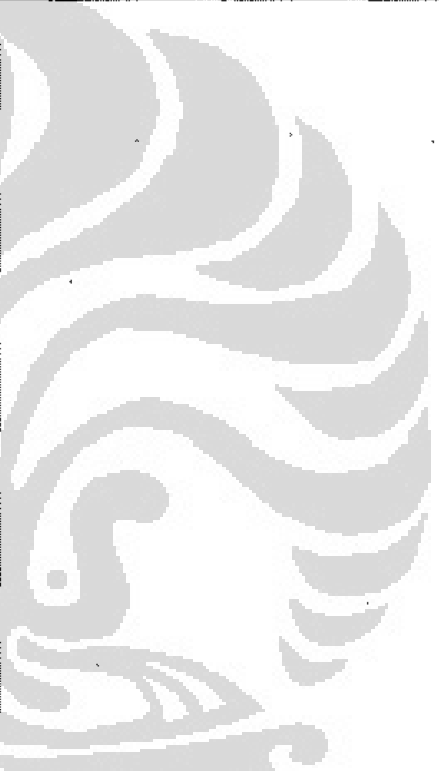
FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF-ASSESSMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuahi untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SELF ASSESSMENT
<p>1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.</p> <p>3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi.</p> <p>4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.</p>	
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/ASPEK ASSESMENT
<p>1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. <p>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p>	

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.
- Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

KESIMPULAN, IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN

--	--

**FAKTOR PENILAIAN:
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. 	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/RELEVANSI/ASPEK/ENTR
<p>1. Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. ▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. 	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.</p>	
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
KREDIBILITAS/INDIKATOR	
<p>I. Komite Audit</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. ▪ Komite Audit telah mereview: <ul style="list-style-type: none"> ○ pelaksanaan tugas SKAI; ○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; ○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan ○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. ▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	
<p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none">○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;	

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none"> Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris. 	
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/STRENGTH ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. 	
KRITERIA/BERINGKAT/FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat I	<ul style="list-style-type: none"> Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.

FAKTOR PENILAIAN:


KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.• Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELA/RESMI/RENTAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. 	
KRITERIA PUNGGKAI - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN	
	

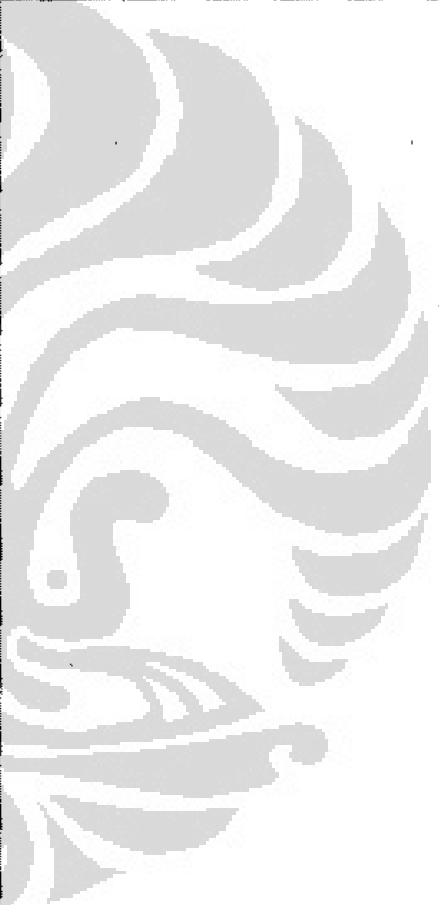
FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/ASPEK/ASPEK/ASPEK
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui: <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p>	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	
KRITERIA PERINGKAT: FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU BERTINDAK	

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA INDIKATOR	ANALISIS SODE ASSESSMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. <p>2. Bank:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> o Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); 	


FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - Menyusun panduan audit intern.
 - Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
 - Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.
 - Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
 - Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.
3. SKAI telah:
- Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 - Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
 - kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
 - kualitas kinerja.
 - Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.

**FAKTOR PENILAIAN:
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. 	
KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
RESUMEPAN PIDEINILIKASIMASALAHURONCANAINDUK DANWAKILURDNYELISAN	
<p style="text-align: center;">  </p>	

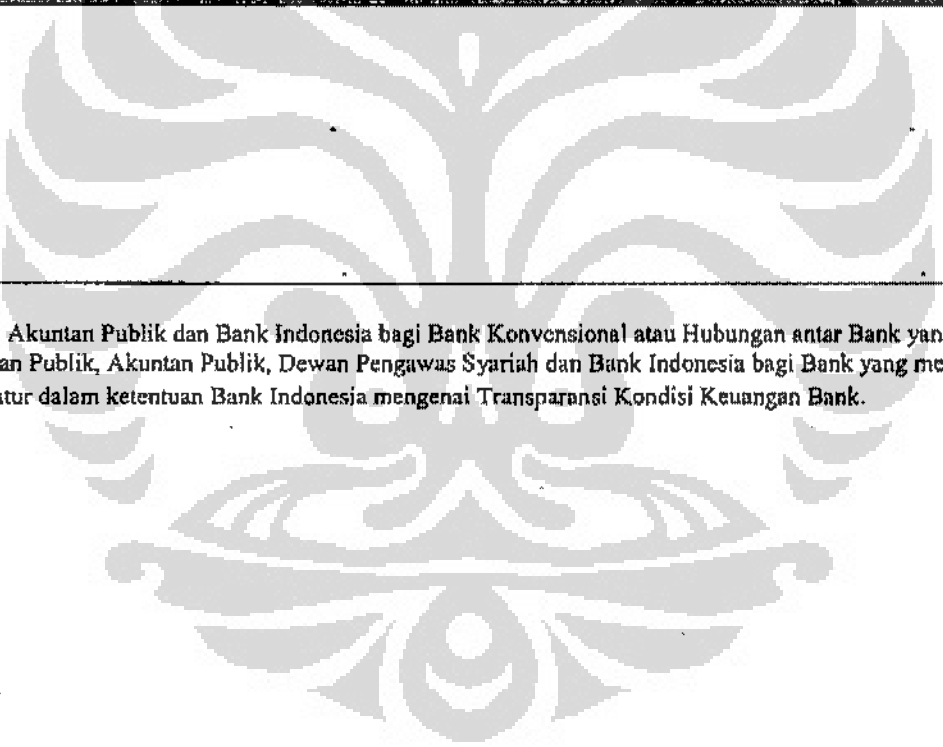
**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SEDA/ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 	

**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	
KENYATAAN BERINGKAT FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.

**FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN**

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.
KESIMPULAN: IDENTIFIKASI MASALAH DAN RENCANA DINDAK DAN YAKHUBUNH BELISALAN	
	

³ Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern	
KRITERIA INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. <p>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. 	
KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.

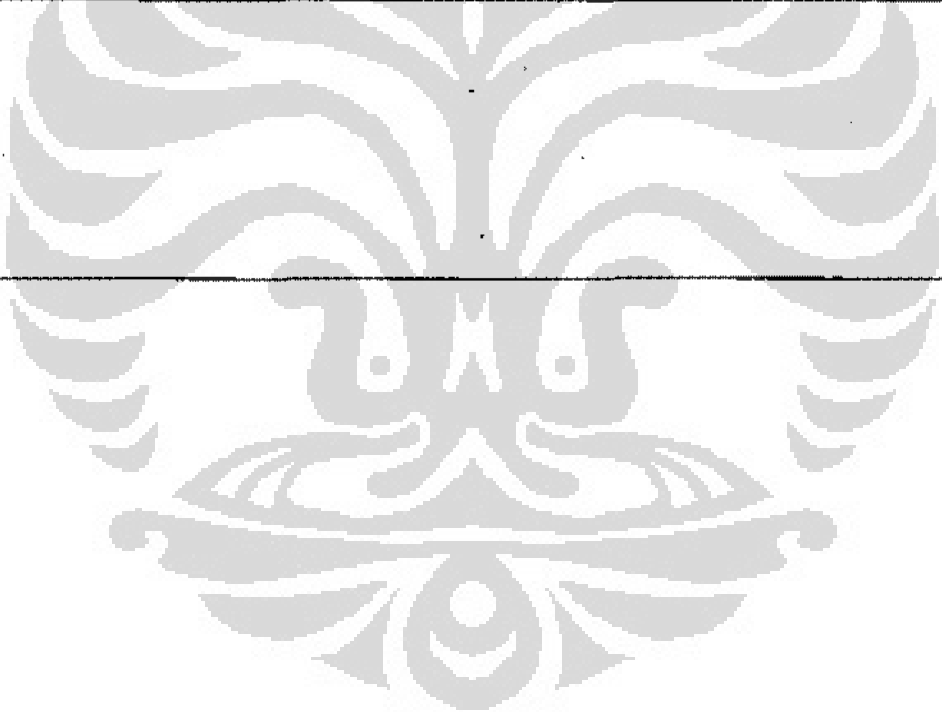
FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<ul style="list-style-type: none">• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.
KESEMPULAN, IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN	
	

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SEDI/ASAS/LENI
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. 	

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)	
<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. <p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	
KRITERIA PERINGKAT - FAKTOR PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	
<p>Peringkat 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.
<p>Peringkat 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan.• Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar..• Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan• Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.• Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan.• Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan.• Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.

Lampiran 2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/ /DPNP Tanggal Mei 2007

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

KESTABILAN, IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU MENYELESAIKAN



--

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; • cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). 	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Bank wajib dan telah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. 	

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

- Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:
 - Bank Indonesia;
 - YLKI;
 - Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
 - Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
 - LPPI;
 - 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi:
- Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;
 - Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance	
INDIKATOR	ASPEK YANG DINYAKAN
<p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah:</p> <ul style="list-style-type: none">• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bank Indonesia;• YLKI;• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;	

FAKTOR PENILAIAN:

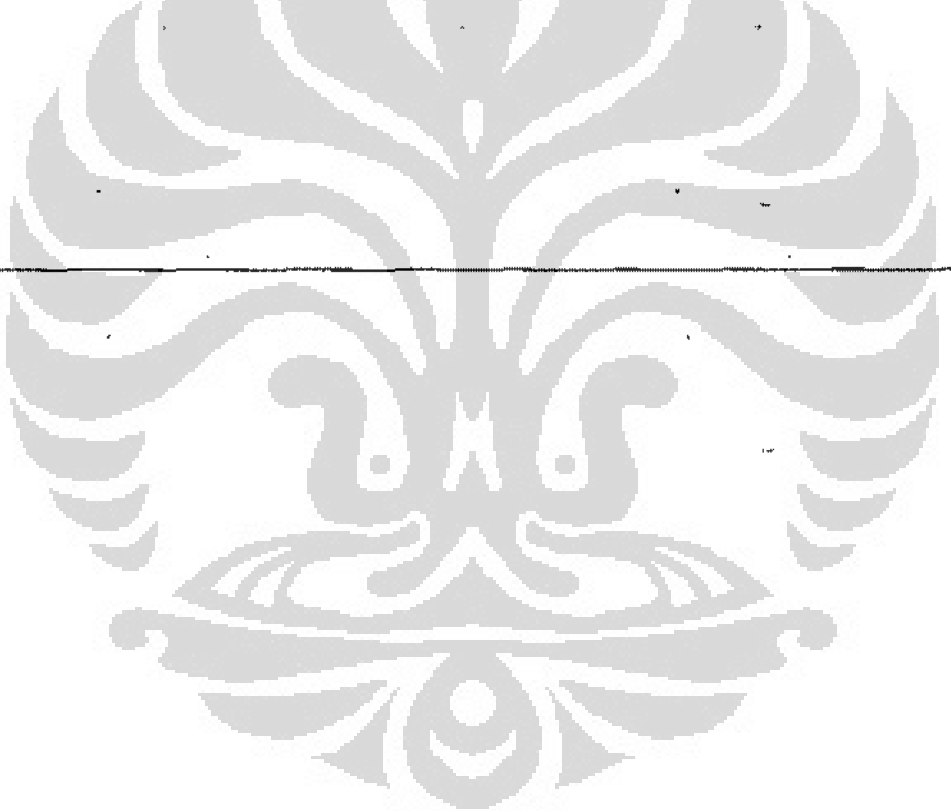
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu. <p>5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu</p>	
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai. 	
Kategori Beningkat - Faktor Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal	
<p>Peringkat I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL
KESIMPULAN, IDENTIFIKASI RISIKO, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYEMPULAN



FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none">• Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai.• Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). 	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS/SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif; 	

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	
KRITERIA PERINGKAT – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK LAMUN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.

**FAKTOR PENILAIAN:
RENCANA STRATEGIS BANK**

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 4.	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i>.
KESIMPULAN, IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN	